

**PENERAPAN KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
DI BAWAH UMUR DI KOTA MAKASSAR**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum (SH) Jurusan Ilmu Hukum
Pada Fakultas Syariah dan Hukum
(UIN) Alauddin Makassar

Oleh :

MUH. IRFAN
NIM.10500113034

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muh. Irfan
Nim : 10500113034
Tempat/Tgl. Lahir : Bone, 15 April 1995
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Villa Mandiri, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba
Opu, Kabupaten Gowa
Judul : Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam
Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak
Di bawah Umur Di Kota Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSA

Makassar, 12 Juli 2017
Penyusun,


Muh. Irfan

NIM : 10500113034

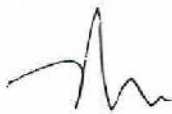
PERSETUJUAN PENGUJI DAN PEMBIMBING

Penguji penulisan skripsi Saudara **Muh. Irfan**, NIM: 10500113034, mahasiswa program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan berjudul **"Penerapan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur di kota makassar"**, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk di proses selanjutnya.

Gowa, 02 April 2017

Penguji I



Rahman Svamsuddin. S.H.,M.H
NIP. 19821207 200901 1 010

Penguji II



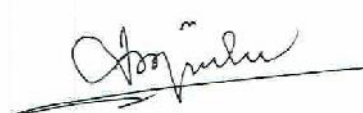
Dr. Marikang. S.H.,M.Hum,
NIP. 19621231 199303 1 024

Pembimbing I



Ahkam Jayadi. S.H.,M.H.
NIP.19611024 198703 1 003

Pembimbing II



Abdul Rahman Kanang.M.Pd.,Ph.D
NIP. 19731231 200501 1 034

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "**PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI KOTA MAKASSAR**", yang disusun oleh Muh. Irfan, NIM: 10500113034, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2017, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

Samata, 20 Juni 2017

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Istiqamah, S.H., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Rahman Syamsuddin, S.H., M.H	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Marilang, S.H., M.Hum	(.....)
Pembimbing I	: Ahkam Jayadi, S.H., M.H.	(.....)
Pembimbing II	: Abd. Rahman Kanang, M.Pd, Ph.D	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.

NIP. 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga proses penyusunan skripsi ini yang berjudul “Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Di Kota Makassar” dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw sebagai *rahmatan li al-'alamin* yang telah membawa umat manusia dari kesesatan kepada kehidupan yang selalu mendapat sinar ilahi.

Saya sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan yang saya miliki, tapi karena dukungan dan bimbingan serta doa dari orang-orang sekeliling saya akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya saya berikan kepada :

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Ibu Istiqamah S.H.,M.H selaku ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Rahman Syamsuddin S.H.,M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum.
4. Bapak Ahkam Jayadi,S.H.,M.H. dan Bapak Abdul Rahman Kanang. Ph.D. selaku pembimbing yang senantiasa membimbing ananda dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak Rahman Syamsuddin, S.H.,M.H dan Bapak Dr. Marilang, S.H.,M.Hum selaku penguji yang senantiasa memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ketua Pengadilan Negeri Makassar dan Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk melakukan penelitian.
7. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, terima kasih untuk seluruh didikan, bantuan dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis.

8. Kedua orang tua tercinta, ayah dan ibu yang telah memberikan dukungan dan kasih sayang yang luar biasa besarnya kepada penyusun. Serta keluarga besarku yang ada di Kabupaten Bone yang selalu memberikan dukungan yang terbaik.
9. Keluarga besar Ilmu Hukum A Angkatan 2013, Saudara-saudara seperjuangan, Terima kasih untuk kalian semua, kalian saudara yang hebat dan luar biasa.
10. Keluarga besar ikatan penggiat peradilan semu Universitas islam Negeri Alauddin Makassar, kakanda-kakanda yang telah membagikan pengalamannya, *letting* serta adinda yang selalu memeberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini
11. Keluarga besar Ikatan keluarga Alumni pondok pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone
12. Keluarga KKN-R Angkatan 53 se-kecamatan Bajeng untuk partner terbaik saya Nursyamsi Dermawati S.Pd yang tidak henti-hentinya memberikan pendampingan dalam penyelesaian skripsi ini.

Untuk kesempurnaan skripsi ini, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak, semoga skripsi ini kedepannya dapat bermanfaat untuk semua orang.

Makassar, 15 Mei 2017

Penyusun,

Muh. Irfan

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1-10
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus penelitian dan deskripsi fokus	7
C. Rumusan masalah.....	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN TEORETIS	11-46
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur	11
1. Pengertian Anak	11
2. Perlindungan Hukum terhadap Anak	13
3. Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	14
B. Tinjauan Terhadap Tindak Pidana.....	16
1. Pengertian Tindak Pidana.....	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	18
3. Jenis-Jenis Perbuatan Yang Termasuk Tindak Pidana.....	19
C. Tinjauan Terhadap Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>) .	21
1. Pengertian Konsep <i>Restorative Justice</i>	21
2. Aspek Historis Doktrin <i>Restorative Justice</i>	24

3. Model-Model Penerapan <i>Restorative Justice</i>	28
4. <i>Restorative Justice</i> Sebagai Tujuan Pemidanaan	37
D. Sistem Peradilan Pidana Anak	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	47-53
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	47
B. Metode Pendekatan	48
C. Sumber Data.....	48
D. Metode Pengumpulan Data.....	49
E. Instrumen Penelitian.....	50
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	51
G. Pengujian Keabsahan Data.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54-75
A. Faktor Yang Melatarbelakangi Anak Melakukan Tindak Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar	54
B. Dasar Penerapan Konsep <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Makassar	65
C. Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Dalam Menerapkan Konsep <i>Restorative Justice</i> Pada Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Makassar.....	68
BAB V PENUTUP.....	78-80
A. Kesimpulan	78
B. Implikasi Penelitian.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80-82
LAMPIRAN	83-113
RIWAYAT HIDUP.....	114

ABSTRAK

Nama : Muh. Irfan
Nim : 10500113034
Judul : penerapan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur di kota makassar

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana penerapan konsep *Restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur di kota makassar. Pokok masalah tersebut selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Faktor apakah yang melatarbelakangi sehingga anak melakukan tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar? 2) Apakah yang mendasari penerapan konsep *Restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar? 3) Bagaimanakah pelaksanaan diskresi kepolisian dalam menerapkan konsep *Restorative justice* pada kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang menggabungkan antara Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data kualitatif yaitu dengan mengelola data primer yang bersumber dari Hakim di Pengadilan Negeri Makassar dan Penyidik POLRESTABES Makassar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Faktor-faktor yang melatarbelakangi anak di bawah umur melakukan tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar diantaranya adalah: (a) Faktor kemiskinan, (b) Faktor rendahnya pendidikan, (c) Faktor pengaruh negatif lingkungan Pergaulan, (d) Faktor pengaruh negatif teknologi, 2) Yang menjadi landasan pemikiran dari penerapan konsep *Restorative justice* pada penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar adalah bahwa anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda, anak berperan sangat strategis sebagai generasi penerus suatu bangsa. Sehingga perubahan Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak menjadi penting hal ini diadasari bahwa telah terjadi kegagalan dalam sistem peradilan pidana anak untuk memberikan rasa keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, lalu kemudian lahir Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang didalamnya mengamanahkan untuk menerapkan konsep *Restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan dipercaya dapat menjadi solusi yang tepat untuk memberikan rasa keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. 3) Pelaksanaan diskresi dalam penyelesaian tindak pidana oleh anak di kota Makassar seringkali dilakukan karena sangat membantu bagi penyidik dalam meringankan beban kerja terlebih lagi banyaknya kasus tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya, namun demikian terdapat kasus-kasus tertentu yang tetap diproses sebagaimana hukum formil seperti kasus yang berkaitan dengan asusila.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Negara Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ketiga. Sebagai negara hukum sudah seharusnya dalam setiap kegiatan dan aktifitas masyarakat serta pemerintahan berdasarkan atas hukum. Hukum dijadikan panglima dalam penyelenggaraan Negara.

Sejalan dengan pernyataan tersebut di atas, Indonesia telah memberikan perlindungan hukum kepada anak melalui berbagai peraturan perUndang-undangan di antaranya Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak.

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional telah mengesahkan konvensi hak anak. Konvensi ini merupakan instrumen internasional yang secara yuridis mengikat bagi setiap Negara yang telah meratifikasinya. Sehingga setiap Negara tersebut memiliki kewajiban hukum internasional untuk menerapkan ke dalam aturan-aturan hukum positifnya. Di Indonesia sendiri, penjabaran tentang isi dan jiwa dari konvensi hak anak termuat dalam Undang-undang RI Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak

Anak dengan segala pengertian dan defenisinya memiliki perbedaan karakteristik dengan orang dewasa, ini merupakan titik tolak dalam memandang hak dan kewajiban anak yang akan mempengaruhi pula kedudukannya di hadapan

hukum. Anak merupakan amanah dan karunia tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Menurut Retnowulan Sutinto, perlindungan anak merupakan bagian dari pembangunan Nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hal ini tercermin pada hakekat pembangunan nasional yaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional.¹

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda, anak berperan sangat strategis sebagai generasi penerus suatu bangsa. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Undang-undang itu juga bertujuan melindungi anak agar mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, sehat, cerdas, berakhlak mulia dan sejahtera sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang

¹Romli atmasasmita, *Peradilan Anak Di Indonesia* (bandung: mandar maju, 1997), h. 166

dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya.

Penerapan hukuman Pidana yang berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak sepenuhnya dapat mendidik anak menjadi lebih baik, melainkan dapat memperburuk kondisi serta dapat meningkatkan tingkat kejahatan anak. Hal ini disebabkan karena paradigma aparat penegak hukum yang menganggap anak tersebut sebagai anak nakal dan bukan sebagai korban melainkan semata-mata sebagai pelaku tindak pidana.

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat diperlukan, mengingat anak yang berhadapan dengan hukum berada pada situasi dan kondisi diluar kemampuan mental dan psikisnya serta dalam proses pemeriksaan pada tahap penyidikan, penyidik hanya melihat kepentingan proses hukum tanpa memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan anak. Untuk itu harus mendapat perlindungan hukum, mengingat mereka sangat peka terhadap berbagai ancaman gangguan mental, fisik dan sosial.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, telah mencantumkan suatu konsep dalam penyelesaian perkara pidana anak yaitu konsep *Restorative justice*. Konsep ini dilakukan dalam penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yng terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, (pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak). Selain itu, di dalam Undang-undang ini juga menegaskan bahwa konsep *Restorative justice* wajib diutamakan dalam hal sistem peradilan pidana anak yang meliputi:

1. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang sistem peradilan pidana anak
2. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
3. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan setelah menjalani pidana.²

Terkait dengan konsep *Restorative justice* di dalam ajaran Islam terdapat ketentuan tentang perdamaian (*ishlah*) yang di dalamnya mengandung nilai-nilai keadilan Restorative. Kata *ishlah* banyak ditemukan dalam Al-qur'an, yang mengacu bukan hanya pada sikap rohania belaka, tetapi juga pada tindakan realistis untuk rekonsiliasi demi kemaslahatan umum. Melalui sarana *ishlah*, pihak-pihak yang berkepentingan dipertemukan untuk rukun kembali. Adapun dasar terwujudnya *ishlah* adalah memberi maaf. Hal ini antara lain juga dapat dilihat dalam lembaga hukum *diyat* (permaafan dan dan pembayaran ganti rugi) yang terkait dengan *Qishash*.³ QS Al-Baqarah/2: 178 menegaskan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّىٰ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah mengikuti dengan cara

²Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," bab I, Pasal 5 ayat (2).

³Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 30-31

yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu maka baginya siksa yang sangat pedih.⁴

Restorative justice merupakan upaya untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa Penangkapan penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Restorative justice memberikan penegasan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum bukan untuk dihukum melainkan harus dibimbing dan dibina agar dapat menjadi anak yang lebih baik, karena tujuan utama dari *Restorative justice* adalah pemulihan atau mengembalikan kepada kondisi semula dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mempertanggung jawabkan atas apa yang telah ia lakukan. Untuk menerapkan *Restorative justice* perlu adanya kebijakan dari pihak kepolisian sebagai penegak hukum untuk menggunakan kewenangan diskresi dalam menilai sebuah perkara anak yang masuk apakah dapat dilanjutkan ataukah dihentikan.

Berdasarkan data awal yang penulis peroleh dari website resmi Pengadilan Negeri Makassar, didapatkan data bahwa sejak bulan januari tahun 2016 sampai dengan bulan oktober tahun 2016 terdapat 253 anak yang berhadapan dengan hukum dengan berbagai macam tindak pidana. Yang jika digambarkan dalam bentuk tabel maka akan tergambar sebagai berikut:

⁴Al-Qur'an dan Terjemahannya, Kementerian Agama Republik Indonesia (Kudus: Menara Kudus, 2009), h. 27.

Tabel 1.1 data perkara tindak pidana oleh anak di wilayah hukum**Pengadilan Negeri Makassar tahun 2016**

NO	Tindak Pidana	Jumlah Kasus
1	pencurian	168
2	Narkotika	34
3	Tindak pidana senjata api atau benda tajam	29
5	Kejahatan terhadap ketertiban umum	9
6	perjudian	4
7	Kejahatan terhadap nyawa	3
8	penganiayaan	3
9	Kejahatan terhadap kesusilaan	2
11	Pemerasan dan pengancaman	1
Total		253

Sumber: data Pengadilan Negeri Makassar

Dari data tersebut, dengan menunjukkan banyaknya perkara anak yang berhadapan dengan hukum yang telah teregistrasi di Pengadilan Negeri Makassar. Mengindikasikan bahwa anak pelaku tindak pidana tetap di proses secara formal dan telah melalui tahap penyidikan dan pemeriksaan berkas di kejaksaan. Dan karena berkasnya dianggap telah lengkap maka dilimpahkanlah ke pengadilan Negeri untuk selanjutnya diperiksa hakim Pengadilan Negeri Makassar.

Selain daripada itu, berdasarkan data lembaga pemasyarakatan kelas 1 Kota Makassar. bahwa sampai pada bulan oktober tahun 2016 terdapat 65 tahanan anak yang berarti bahwa anak-anak tersebut sedang dalam masa penahanan dalam hal ini penahanan oleh penyidik, penuntut umum ataupun penahanan oleh hakim pengadilan Negeri. Dan juga terdapat 12 orang anak yang berstatus sebagai

narapidana yang berarti bahwa anak-anak tersebut telah dijatuhi putusan bersalah melakukan tindak pidana oleh majelis hakim.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dilakukan suatu kajian dalam bentuk penelitian tentang hal-hal yang menyebabkan banyaknya anak di bawah umur pelaku tindak pidana diproses secara formal dalam penyelesaian perkaranya. Sedangkan Undang-undang perlindungan anak mengamanatkan bahwa penangkapan dan penahanan anak hanya dilakukan sebagai upaya terakhir serta mengutamakan pendekatan *Restorative justice*.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Skripsi ini berjudul “penerapan konsep *Restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Kota Makassar”. Untuk memberikan arah yang tepat terhadap masalah yang dibahas, maka akan diuraikan pengertian kata-kata yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Tindak pidana

Yang dimaksud dengan tindak pidana dalam skripsi ini adalah segala perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh Undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.

2. Anak dibawah umur

Anak di bawah umur yang dimaksud dalam skripsi ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

3. Konsep *Restorative justice*

penyelesai perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan dalam latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti dalam beberapa rumusan:

1. Faktor apakah yang melatarbelakangi sehingga anak melakukan tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar?
2. Apakah yang mendasari penerapan konsep *Restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar?
3. Bagaimanakah pelaksanaan diskresi kepolisian dalam menerapkan konsep *Restorative justice* pada kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar?

D. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan skripsi dibutuhkan berbagai dukungan teori dari berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian. Sebelum melakukan penelitian, penulis telah melakukan kajian terhadap karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun penelitian yang memiliki relevansi dengan judul penulis, sebagai berikut:

1. Bambang Waluyo dalam bukunya desain fungsi kejaksaan pada *Restorative justice*, buku ini pada pokoknya menjelaskan mengenai penyelesaian perkara pidana di luar Pengadilan secara umum dan konsep *Restorative justice* secara khusus mulai dari pembahasan terkait dengan perwujudan supremasi hukum melalui *Restorative justice* sampai dengan kendala-kendala yang dialami dalam

pengimplementasian konsep *Restorative justice*. Dan di dalam buku ini terdapat beberapa hal yang belum dibahas terkait konsep *Restorative justice* dan yang nantinya akan dibahas oleh penulis dalam skripsi ini seperti arti penting diberlakukannya konsep *Restorative justice*.

2. R. Wiyono dalam bukunya sistem peradilan pidana anak di Indonesia, buku ini berisikan analisis yuridis dari ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang meliputi pengertian, sistem peradilan pidana anak, instrument internasional tentang perlindungan hukum anak, keadilan restorative, diversifikasi, hukum acara peradilan anak, ketentuan pidana dan sanksi.
3. I Made Wahyu Chandra Satriana, Program study Ilmu Hukum program pascasarjana Universitas Udayana dalam jurnalnya yang berjudul kebijakan formulasi keadilan restorative dalam sistem peradilan pidana anak, Jurnal ini berisikan analisis terkait ide dasar yang terdapat dalam keadilan restorative kaitannya dengan anak yang berhadapan dengan hukum.
4. M. Taufik Makaraao dalam jurnalnya yang berjudul Pengkajian hukum tentang penerapan *Restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, jurnal ini berisikan tentang hukum positif yang terkait dengan anak, aspek historis doktrin *Restorative justice* dan tinjauan diversifikasi dalam peradilan anak.

E. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian.

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar.

- b. Untuk mengetahui hal yang mendasari penerapan konsep *Restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar
- c. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan diskresi kepolisian dalam menerapkan konsep *Restorative justice* pada kasus tindak pidana oleh anak di Kota Makassar

2. Kegunaan penelitian.

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi tentang pemahaman kepada setiap lapisan masyarakat baik itu masyarakat biasa maupun para penegak hukum terkait penerapan konsep *Restorative justice* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Adapun secara detail kegunaan tersebut diantaranya sebagai berikut:

- a. Dapat menambah dan memperluas wawasan pembaca dibidang ilmu pengetahuan khususnya di bidang penegakan hukum dan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
- b. Dapat menjadi referensi bagi pembaca dalam melihat sejauh mana konsep *Restorative justice* dapat memberikan pengaruh dalam penyelesaian perkara pidana oleh anak di bawah umur.
- c. Dapat memberikan informasi baru kepada masyarakat tentang konsep *Restorative justice* dalam penyelesain perkara pidana oleh anak di bawah umur.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur

1. Pengertian anak.

- a. Menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa *“anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”*. Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut:¹

- 1) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Frasa “Belum berusia 18 (delapan belas) tahun” dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sama dengan frasa “dibawah umur 18 (delapan belas) dalam pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak anak yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 5 tahun 1998.

- 2) Termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Untuk memberikan arti dari frasa “Termasuk anak yang masih dalam kandungan” dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak agar dikaitkan dengan pasal 2 KUH Perdata yang menyatakan bahwa *“anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya”*

¹R.Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta: sinar grafika, 2016), h. 12.

b. Menurut Konvensi Hak-Hak anak

Pasal 1 konvensi Hak-hak anak menyatakan bahwa *“untuk tujuan-tujuan konvensi ini maka, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut Undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”*.

Konvensi Hak-hak anak (*Convention On The Rights of the Child*), Resolusi Nomor 109 tahun 1990 yang diratifikasi dengan keputusan presiden RI Nomor 36 tahun 1990 dan dijadikan salah satu pertimbangan dibentuknya Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

c. Menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem perdilan pidana anak

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem perdilan pidana anak adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 adalah terdiri atas:²

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 1 angka 3);
- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (pasal 1 angka 4);
- 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat

²Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, bab I, angka 3-5.

memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri (pasal 1 angka 5)

2. Perlindungan hukum terhadap anak.

Arti Perlindungan anak dalam Undang-undang perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³

Dengan demikian pada dasarnya anak harus dilindungi karena anak mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap seluruh penyelenggara perlindungan anak yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Tentu semua mempunyai peran dan fungsinya yang berbeda dimana secara keseluruhan, satu sama lain saling terkait di bawah pengertian perlindungan sebagai payungnya.

Di dalam Undang-undang perlindungan anak juga mengatur mengenai adanya perlindungan khusus yang diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat, yaitu anak yang menjadi pengungsi, korban kerusuhan, korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik bersenjata;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual;
- e. Anak yang diperdagangkan;
- f. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;

³Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, bab I, pasal 1, angka 3.

- g. Anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan;
- h. Anak korban kekerasan fisik maupun mental;
- i. Anak yang menyandang cacat
- j. Anak korban perlakuan salah dan pelantaran.⁴

3. Hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.

Hak anak secara umum menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah bahwa setiap anak berhak 1) Hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, 2) mendapatkan nama, 3) beribadah menurut agama dan berekspresi, 4) memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, 5) mengetahui dan diasuh oleh orangtuanya, 6) pendidikan dan pengajaran, 7) menyatakan dan didengar pendapatnya, 8) beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, 9) memperoleh perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan fisik dan psikis, penganiayaan, ketidakadilan, 10) memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan peperangan, 11) hak kebebasan sesuai hukum, 12) penangkapan, penahanan, penjara, anak dilakukan bila sesuai hukum dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.⁵

Sedangkan hak anak yang berhadapan dengan hukum menurut pasal (3) dan (4) Undang-undang nomor 11 tahun 2012 diantaranya adalah:

- a. Anak yang sedang dalam proses peradilan pidana
 - 1) Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;

⁴Ahmad Irawan, *“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak”*, Skripsi (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013), h. 46.

⁵Ahmad Irawan, *“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak”*, Skripsi (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013), h. 47.

- 2) Dipisahkan dari orang dewasa;
 - 3) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
 - 4) Melakukan kegiatan rekreasional;
 - 5) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat martabatnya;
 - 6) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
 - 7) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu paling singkat;
 - 8) Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
 - 9) Tidak dipublikasikan identitasnya;
 - 10) Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
 - 11) Memperoleh advokasi sosial;
 - 12) Memperoleh kehidupan pribadi;
 - 13) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
 - 14) Memperoleh pendidikan;
 - 15) Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
 - 16) Memperoleh hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶
- b. Anak yang sedang menjalani masa pidana
- 1) Mendapat pengurangan masa pidana;
 - 2) Memperoleh asimilasi;
 - 3) Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
 - 4) Memperoleh pembebasan bersyarat;
 - 5) Memperoleh cuti menjelang bebas;

⁶Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, bab I, pasal 3.

- 6) Memperoleh cuti bersyarat; dan
- 7) Dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

B. Tinjauan Terhadap Tindak Pidana

1. Pengertian tindak pidana.

Tindak pidana adalah perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman atau sanksi pidana.⁸ Namun hukum pidana belanda memakai istilah *strafbaar feit*, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa latin *Delictum*. Dan oleh karena Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*.⁹

Adanya ancaman sanksi pidana terhadap perbuatan kejahatan atau pidana adalah sebagai konsekuensi dari suatu perbuatan yang dianggap merugikan masyarakat dan yang harus dihindari, menurut maksud dari tatanan hukum. Perbuatan yang merugikan inilah yang disebut delik, suatu istilah yang dipahami berdasarkan pengertiannya yang paling luas. Jika kita bermaksud mendefinisikan konsep delik sesuai dengan asas-asas teori hukum murni, maka maksud dari tatanan hukum atau tujuan pembentukan Undang-undang hanya bisa masuk ke dalam definisi bila maksud dan tujuan tersebut dinyatakan dalam isi yang dihasilkan dari prosedur pembuatan hukum, maksud dan tujuan tersebut diwujudkan dalam isi dari tatanan hukum itu sendiri. Kalau tidak, maka konsep delik tidak akan berupa konsep hukum. Ditinjau dari sudut

⁷Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, bab I, pasal 4, angka 1.

⁸Abdoel Jamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali pers, 2012), h. 175.

⁹Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 86.

pandang ini, delik adalah suatu kondisi atau syarat bagi diberlakukannya sanksi oleh norma hukum.¹⁰

Perbuatan manusia tertentu dinyatakan sebagai delik karena tatanan hukum meletakkan suatu sanksi sebagai konsekuensi dari perbuatan yang merupakan kondisi ini. Asumsi umum yang mengatakan bahwa suatu perbuatan tertentu menghasilkan sebuah sanksi karena merupakan delik, hal itu kurang tepat. Yang tepat adalah perbuatan tertentu merupakan delik karena perbuatan tersebut membawakan suatu sanksi. Sejalan dengan pemaparan tersebut beberapa ahli berpendapat tentang arti dari tindak pidana:

- a. *Simons*: suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹¹
- b. *Pompe*: pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
- c. *E.Utrecht*: Pengertian Tindak Pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* positif) atau suatu melalaikan (*natalen-negatif*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).
- d. *Moeljatno*: berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yg melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

¹⁰Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State*, terj. Raisul Muttaqien, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Bandung: Nusa Media, 2013), h. 74.

¹¹Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Semarang: Sinar Grafika, 2005), h. 5.

e. *Van Hamel* juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari *simons*, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum”. Jadi, pengertian tindak pidana menurut *Van Hamael* meliputi lima unsur, sebagai berikut :

- 1) Diancam dengan pidana oleh hukum;
- 2) Bertentangan dengan hukum;
- 3) Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*);
- 4) Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya;
- 5) Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.¹²

2. Unsur-Unsur Tindak pidana

a. Unsur objektif

Yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif adalah tindakannya.

b. Unsur Subjektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).¹³

Dilihat dari unsur-unsur tersebut, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah sebagai berikut:

- 1) Harus ada suatu perbuatan, maksudnya adalah memang benar ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Perbuatan

¹²Sugiarto, “Pengertian Tindak Pidana”<http://artong.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html> (03 desember 2016).

¹³Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, h. 7.

tersebut merupakan suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.

- 2) Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang dilukiskan atau dijelaskan dalam ketentuan hukum.
- 3) Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- 4) Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.
- 5) Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya adalah perbuatan tersebut memiliki ancaman hukuman karena tanpa adanya ancaman hukuman maka pelaku perbuatan tersebut tidak perlu mendapatkan hukumannya. Contohnya adalah perbuatan mencuri dalam pasal 362 KUHP yang memiliki ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.¹⁴

3. Jenis-Jenis perbuatan yang termasuk tindak pidana

a. Tindak Pidana Umum

Tindak Pidana Umum merupakan keseluruhan tindak pidana yang termasuk dan diatur dalam KUHP dan belum diatur secara tersendiri dalam Undang-undang khusus, seperti Makar, ejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden, kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala negara sahabat dan wakilnya, kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan, kejahatan terhadap ketertiban umum, perkelahian tanding,

¹⁴Abdoel Jamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, h. 175.

kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, kejahatan terhadap penguasa umum, pemalsuan, kejahatan terhadap asal-usul perkawinan, kejahatan kesusilaan (Pemeriksaan, Pelecehan seksual dan pencabulan), meninggalkan orang yang perlu ditolong, penghinaan, membuka rahasia, kejahatan terhadap kemerdekaan orang, pembunuhan, penganiayaan, menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan, pencurian, penggelapan, penipuan, perbuatan merugikan pemihutang atau orang yang berhak, penghancuran atau Perusakan barang, kejahatan jabatan, kejahatan pelayaran, kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan, penadahan penerbitan dan percetakan, pemerasan dan pengancaman, dan residivis.¹⁵

b. Pidana Khusus

Tindak Pidana Khusus merupakan tindak pidana yang pengaturannya berada diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan telah diatur secara khusus pada Undang-undang Khusus, diantaranya adalah :

- 1) Tindak pidana Narkotika/Psikotropika (Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- 2) Tindak pidana Korupsi (UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Pemberantasan Korupsi).
- 3) Tindak pidana pencucian uang (UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).
- 4) Tindak pidana lingkungan (UU No.32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup).
- 5) Kejahatan HAM (UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia)
- 6) Tindak pidana fiscal (UU tentang Perpajakan).

¹⁵Republik Indonesia, *KUHP/KUHAP* (Surabaya: Bhafana Publishing, 2014), h. 39.

- 7) Tindak pidana ekonomi (UU Darurat nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan tindak pidana ekonomi).¹⁶

C. Konsep *Restorative Justice*

1. Pengertian konsep *restorative justice*.

Istilah “*Restorative justice*” diciptakan oleh seorang psikolog *Albert Eglash* pada tahun 1977, dalam tulisannya tentang ganti rugi (*reparation*). Keadilan restoratif ini sangat peduli dengan usaha membangun kembali hubungan-hubungan setelah terjadinya tindak pidana, tidak sekedar memperbaiki hubungan antara pelaku dan masyarakat. Keadilan restoratif dikatakan oleh Sarre sebagai pertanda (*hallmark*) dari sistem peradilan pidana modern.¹⁷

Keadilan restoratif tidak semata-mata menerapkan keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam sistem peradilan pidana yang bersifat permusuhan/perlawanan (*adversarial system*), proses keadilan restoratif mencari suatu fasilitas dialog antara segala pihak yang terdampak oleh kejahatan termasuk korban, pelaku, para pendukungnya, dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini melibatkan suatu proses dimana semua pihak yang berisiko dalam kejahatan tertentu secara bersama-sama berusaha untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani setelah terjadinya kejahatan dan implikasinya di masa depan.

Menurut Achmad Ali salah satu implementasi dari prinsip *Restorative justice* adalah penyelesaian kasus rekonsiliasi yang telah diterapkan di Afrika

¹⁶Hukum Prodeo, “Jenis-Jenis Perbuatan Yang termasuk Tindak Pidana”, *Situs Resmi Hukum Prodeo*. <http://www.hukumprodeo.com/jenis-jenis-perbuatan-yang-termasuk-tindak-pidana/> (03 september 2016)

¹⁷Rudini Hasyim Rado, “Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, <http://stimur.blogspot.co.id/2015/05/keadilan-restoratif-dalam-sistem.html>, (03 september 2016).

Selatan dan diikuti sejumlah negara lain, seperti Indonesia dan Timor Leste.¹⁸ Untuk lebih memahami teori *Restorative justice*, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa deskripsi tentang istilah, pengertian dan konsep *Restorative justice*. Istilah *Restorative justice* juga didefinisikan dengan berbagai rumusan oleh para ahli. Beragamnya definisi *Restorative justice*, dikarenakan banyaknya model dan bentuk yang berkembang dalam penerapannya. Beragamnya definisi *Restorative justice* juga memperbanyak terminologi yang digunakan untuk menggambarkan aliran keadilan restorasi. Beberapa istilah tersebut, antara lain: *communitarian justice* (keadilan komunitarian); *positive justice* (keadilan positif); *relasional justice* (keadilan relasional); *reparative justice* (keadilan reparatif); dan *community justice* (keadilan masyarakat).¹⁹

Menurut Jeff Christian *Restorative justice* adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum pidana, tetapi juga dikaitkan dengan aspek moral, sosial, ekonomi, agama, dan adat istiadat lokal, serta berbagai pertimbangan lainnya.²⁰

Secara formal di dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak tidak atau belum disebutkan berlakunya keadilan restoratif, tetapi di dalam praktik sudah dilaksanakan, yaitu dengan adanya penyelesaian perkara secara kekeluargaan. Baru secara formil di dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak disebutkan berlakunya keadilan restoratif (pasal 1 angka 6, pasal 5 ayat (1) jo. Ayat (3)).

¹⁸Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal theory) Dan teori Peradilan (judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)* (cet. IV; Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2012), h. 243.

¹⁹Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan* (Bandung: Lubuk Agung, 2011), h. 66.

²⁰Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010), h. 196.

Bagir Manan²¹ memperingatkan bahwa keadilan restoratif adalah terjemahan dari *Restorative justice* membingungkan, karena ada kemungkinan misleading: mengira *Restorative justice* adalah suatu jenis keadilan seperti berbagai ajaran keadilan (*attributive justice, distributive justice, social justice* dan lain-lain). Memang *Restorative justice* sebagai konsep pemidanaan bermaksud menemukan jalan untuk menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang. Misalnya antara kepentingan pelaku dan korban. Akan tetapi *Restorative justice* tidak hanya merumuskan tujuan pemidanaan. Tidak kalah pentingnya adalah mekanisme mencapai tujuan.

Secara konseptual restoratif berisi gagasan dan prinsip antara lain berikut ini:

- a. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, serta kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai *stakeholder* yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win win solution*).
- b. Mendorong pelaku bertanggung jawab terhadap korban atau peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian terhadap korban. Selanjutnya membangun tanggung jawab untuk tidak mengulang lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.
- c. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang). Dengan demikian, sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum.

²¹Rudi Rizky, *Restorative Justice (suatu pengenalan)* (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008) h. 4.

- d. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal daripada penyelesaian dengan cara-cara yang formal (kaku) dan impersonal.²²

Dalam penanganan perkara anak, pasal 5 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012, menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Dengan dipergunakannya frasa “sistem peradilan pidana anak” dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012 tersebut, sistem peradilan pidana anak tidak hanya ditujukan kepada hakim saja, tetapi juga ditujukan kepada penyidik, penuntut umum dan lembaga pemasyarakatan.²³

2. Aspek historis doktrin *restorative justice*.

a. Hukum pidana dan perubahan sosial

1. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setara peradaban manusia itu sendiri. Adapula yang menyebutnya sebagai “*older philosophy of crime control*”. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana.²⁴
2. H.L. Packer: pidana merupakan peninggalan kebiadaban kita masa lalu (*a vestige of our savage past*)²⁵ yang seharusnya dihindari.
3. M. Cherif Bassiouni: sejarah hukum pidana penuh dengan gambaran-gambaran perlakuan yang oleh ukuran-ukuran sekarang dipandang kejam dan melampaui batas. Gerakan pembaharuan pidana di Eropa Kontinental

²²R.wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 42.

²³R.wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, h. 43.

²⁴Gene Kassebaum, *Delinquency And Social Policy*, (London: Prentice Hall, 1974), h. 93.

²⁵H.L. Packer, *The Limits Of Criminal Sanction*, (California: Stanford University Press, 1968), h. 3.

dan di Inggris terutama justru merupakan reaksi humanistik terhadap kekejaman pidana.²⁶

4. Smith dan Hogan: teori retributif tentang pemidanaan merupakan “*a relic of Barbarism*”.²⁷
5. Paham Determinisme: manusia tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis maupun lingkungan kemasyarakatan oleh karena itu pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana melainkan diperlukan tindakan-tindakan perawatan yang bertujuan memperbaiki. Sebaliknya hukum pidana menganut *indeterminisme* yang pada dasarnya berpendapat, bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dan ini merupakan sebab dari segala keputusan kehendak. Tanpa ada kebebasan berkehendak maka tidak ada kesalahan. Apabila tidak ada kesalahan, maka tidak ada pencelaan, sehingga tidak ada pemidanaan.²⁸
6. Alf Ross: pandangan determinisme melahirkan gerakan modern mengenai kampanye anti pemidanaan (*the campaign against punishment*) dengan slogan yang terkenal “*the struggle against punishment*” atau “*abolition punishment*” yang menurut Kinberg bahwa kejahatan pada umumnya merupakan perwujudan daripada ketidak-normalan atau ketidak-matangan pelanggar yang lebih memerlukan tindakan perawatan (*treatment*) daripada pidana.²⁹

²⁶M. Cherif Bassiouni, *Substantive Criminal Law*, (USA: C. Thomas Publisher, 1978), h. 86.

²⁷Smith And Hogan, *Criminal Law*, (London: Butterworths, 1978), h. 6.

²⁸Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto, 2009), h. 146-147.

²⁹J. Andenaes, *The General Part Of The Criminal Law Of Norway* (London: Fred D. Rothmant & Co. sweet & Maxwell, 1965), h. 86.

7. Karel Menninger: perlu diadakan pergeseran dari sikap memidana (*punitive attitude*) kearah sikap mengobati (*therapeutic attitude*).³⁰
8. F. gramatica: hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang dan mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pembedaan terhadap perbuatan. Hukum perlindungan sosial mengisyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial.³¹

Berdasarkan pada kritikan-kritikan terhadap keberadaan hukum pidana tersebut di atas, maka diperlukan perubahan dan pembaharuan menuju kearah kesejahteraan masyarakat khususnya kesejahteraan anak.

b. *Kegagalan Sistem peradilan pidana (SPP)*

Salah satu jenis sanksi pidana adalah pidana pencabutan kemerdekaan yang popular disebut dengan pidana penjara dan pidana kurungan. Penerapan sanksi pidana pencabutan kemerdekaan mengandung lebih banyak aspek-aspek negatif daripada aspek-aspek positifnya. Hal ini terbukti bahwa penjatuan pidana pencabutan kemerdekaan menimbulkan hal-hal negatif sebagai berikut:

- 1) Dehumanisasi pelaku tindak pidana:
- a) Tujuan pidana penjara, pertama adalah menjamin pengamanan narapidana dan kedua adalah memberikan kesempatan-kesempatan kepada narapidana untuk direhabilitasi.
- b) Hakekat dari fungsi penjara tersebut di atas sering kali mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi narapidana yang terlalu lama di dalam lembaga, berupa ketidak-mampuan

³⁰Staley Grupp, *Theories Of punishment*, (London: Indiana University Press, 1971), h. 250

³¹Marc Ancel, *Social Defence A Modern Approach To Criminal Problems*, (London: Routledge & Kegan Paul, 1965),h. 73-74.

narapidana untuk melanjutkan kehidupan secara produktif di dalam masyarakat.³²

2) Prisonisasi Narapidana

Proses Prisonisasi narapidana dimulai ketika narapidana masuk dalam lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan berisi kehidupan penjara sebagai suatu sistem sosial informal yang disebut sebagai sub kultur narapidana. Sub kultur narapidana ini mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan individual narapidana, khususnya proses sosialisasi narapidana tersebut kedalam masyarakat narapidana yang oleh Clemmer disebut sebagai Prisonisasi. Dalam proses Prisonisasi narapidana baru harus membiasakan diri terhadap aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat narapidana. Disamping itu ia harus mempelajari kepercayaan, perilaku-prilaku dari masyarakat tersebut, yang pada akhirnya menimbulkan mental penjahat.³³

3) *A place of contamination*

Menurut Bernes dan Teeters bahwa penjara telah tumbuh menjadi tempat pencemaran yang justru harus dihindari. Di dalam penjara, penjahat kebetulan, pendatang baru, dirusak melalui pergaulannya dengan penjahat-penjahat kronis. Bahkan personil yang paling baikpun telah gagal untuk menghilangkan keburukan yang sangat besar dari penjara ini.³⁴

4) Pidana berjangka pendek

Pidana berjangka pendek akan sangat merugikan di dalam pembinaan sebab disamping kemungkinan hubungan-hubungan yang tidak dikehendaki,

³²Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1984), h. 77-78.

³³Taufik Makarao. "Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak", *Laporan Hasil Penelitian*. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2013), h. 24.

³⁴Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, h. 78.

pidana penjara jangka pendek jelas tidak mendukung kemungkinan untuk mengadakan rehabilitasi narapidana.³⁵

5) *Stigmatization*

Kerugian lain yang sangat dirasakan dari penerapan pidana penjara adalah terjadinya stigmatisasi. Menurut *Hoefnagels*, stigma terjadi bilamana identitas seseorang terganggu atau rusak disebabkan oleh pandangan masyarakat sekitar terhadapnya. Secara psikologis stigmatisasi menimbulkan kerugian besar bagi pelaku tindak pidana, karena dengan demikian publik mengetahui bahwa ia seorang penjahat, dengan segala akibatnya.³⁶

Bersamaan dengan kegagalan sistem peradilan pidana yang didasari dinamika perubahan dan perkembangan hukum pidana timbul suatu paradigma penghukuman yang disebut *Restorative Justice*. Dikatakan sebagai *just peace ethics* karena pendekatan terhadap kejahatan *Restorative Justice* bertujuan untuk memulihkan kerusakan akibat kejahatan, upaya ini dilakukan dengan mempertemukan korban, pelaku dan masyarakat.

3. Model-model penerapan *Restorative Justice*

Restorative Justice merupakan konsep penyelesaian perkara yang harus diimplikasikan melalui proses yang nyata. Penerapan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam pendekatan *Restorative Justice* dapat dilihat dalam berbagai model dan bentuk penyelesaian pidana di luar pengadilan yang selama ini dijalankan masyarakat. Proses *Restorative Justice* dapat dilakukan dalam beberapa mekanisme, tergantung situasi dan kondisi yang ada serta kebiasaan masyarakat setempat. Bahkan ada yang mengombinasikan satu

³⁵Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, h. 80

³⁶Taufik Makarao. "Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak", *Laporan Hasil Penelitian*. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2013), h. 25.

mekanisme dengan mekanisme yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa model penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *Restorative Justice* memiliki berbagai macam model dan nama mekanisme penyelesaian.³⁷

Walaupun memiliki berbagai macam model, penerapan *Restorative Justice* setidaknya harus memenuhi 3(tiga) hal berikut ini: *pertama*, mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian/kerusakan(*identifying and taking steps to repair harm*); *kedua*, melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*involving all stakeholders*); *ketiga*, transformasi dari pola dimana Negara dan masyarakat menghadapi pelaku dengan pengenaan sanksi pidana menjadi pola hubungan kooperatif antara pelaku di satu sisi dengan masyarakat/korban dalam menyelesaikan masalah akibat kejahatan (*transforming the traditional relationship between communities and their government in responding to crime*).³⁸

Stephenson, Giller dan Brown, membedakan 4 (empat) model penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*, yaitu: *victim offender mediation* (mediasi panel), *Restorative conference* (converencing), *family group conference* (FGC), dan *Community Panels Meetings* (CPM).³⁹ Dalam “*explanatory memorandum*” dari rekomendasi dewan Eropa Nomor R (99) 19 tentang “*mediation and panel mediation*”, dikemukakan 6 (enam) model mediasi panel, yaitu: *informal mediation*, *traditional village or tribal moots*, *victim-offender mediation*, *reparation negotiation programmes*, *community panels or court*, dan *family and*

³⁷Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, h.167.

³⁸Mc Cold and wachel, *Restorative Justice, The International Institute Or Restorative Practice(IIRP)* (New York:Criminal Justice Press&Amsterdam:Kluger Publication Journal, 2003), h. 7.

³⁹I Made Agus Mahendra Iswara, “Mediasi Panel Penerapan Nilai-Nilai *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Di Bali”, *Tesis* (Jakarta: Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2013), h.46-47.

community group conferences.⁴⁰ selain itu, juga masih banyak lagi model dan istilah yang digunakan, seperti *Circles*, *restorative Board/youth panels* dan lain-lain

a. *Victim-Offender Mediation (mediasi penal)*

Di dalam model ini, penerapan pendekatan *Restorative Justice* dilakukan dengan cara membentuk suatu forum yang mendorong pertemuan antara korban dan pelaku serta pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator yang netral dan imparial. Dalam hal ini mediator bertindak sebagai koordinator dan fasilitator dalam suatu forum pertemuan yang bertugas membantu para pihak untuk berkomunikasi satu sama lainnya dalam rangka mencapai kesepakatan bersama.⁴¹

Mediator dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi, mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang. Model ini memiliki banyak variasi dan dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap kebijaksanaan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. Dalam penerapannya, model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana; ada yang khusus untuk anak; ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu (misalnya pengutulan, perampokan dan tindak kekerasan). Ada yang terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku pemula, namun ada juga untuk delik-delik berat, bahkan untuk residivis.⁴²

Victim-Offender Mediation dirancang untuk mencari kebutuhan-kebutuhan yang menjadi prioritas korban, khususnya kebutuhan untuk didengar

⁴⁰Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, h.168.

⁴¹Barda Nawawi Arif, "Upaya Non-Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan" (Makalah Yang Disajikan Dalam Seminar Kriminologi VI, Semarang, 16-18 September 1981), h. 5.

⁴²Bambang Waluyo, *Desain fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, h.168.

keinginannya, mengenai: bentuk tanggung jawab yang harus dipikul pelaku; kebutuhan akan pengobatan atau pendampingan bagi korban; dan keinginan korban untuk didengarkan oleh pelaku, dampak dari tindak pidana yang dilakukan pelaku bagi kedua belah pihak serta diskusi tentang penanganan dan usaha perbaikan dari dampak yang diderita oleh keduanya. Pihak korban dilibatkan secara langsung untuk menyusun sebuah rencana ganti rugi yang harus ditanggung pelaku atas kehilangan dan kerugian yang diderita korban.

Dalam pertemuan tersebut, pihak korban dapat menggambarkan pengalamannya berkaitan dengan tindak pidana yang dialami dan efek yang ditimbulkannya. Disisi lain pelaku juga dapat menjelaskan perbuatan pidana yang dilakukannya dengan latar belakang mengapa si pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Pelaku dapat bertanggung jawab secara langsung atas kelakuannya, belajar mendapat akibat atas apa yang diperbuatnya dan untuk membangun rencana untuk membuat ganti rugi kepada orang yang dilukainya.⁴³

Selain dilakukan secara langsung, mediasi juga dapat dilakukan secara tidak langsung (*shuttle mediation*). Adapun yang dimaksud dengan mediasi secara tidak langsung ialah antara korban dan pelaku tidak harus bertemu secara langsung dalam suatu forum. Mediator dimungkinkan memainkan peranan yang lebih, di mana ia dapat bertemu secara satu per satu dengan masing-masing pihak, sampai terjalin suatu kesepakatan yang akan dilakukan.⁴⁴

⁴³Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, h.169.

⁴⁴I Made Agus Mahendra Iswara, "Mediasi Panel Penerapan Nilai-Nilai *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Di Bali", h. 46.

b. Restorative conference (conferencing)

Restorative conference atau *conferencing* merupakan model penyelesaian perkara pidana dengan menerapkan pendekatan *Restorative Justice* yang dikembangkan secara tradisional oleh suku maori di selandia baru. Penyelesaian perkara dengan menggunakan model ini dilakukan dalam bentuk conferencing, di mana penyelesaian perkara tidak hanya melibatkan pelaku dan korban langsung (*primary victim*), tetapi juga melibatkan korban tidak langsung (*secondary victim*), seperti: keluarga, kawan dekat korban serta kerabat dari pelaku.

Dalam model ini, fasilitator mengupayakan agar para pihak di luar korban dan pelaku turut berpartisipasi secara aktif. Akan tetapi mereka tidak boleh memainkan peranan, terkait dengan substansi materi yang didiskusikan antara kedua pihak utama itu. Beberapa model conferencing dilakukan secara tertulis di mana fasilitator yang mengungkapkan dan kemudian memimpin proses ini. Model ini dilakukan tanpa suatu aturan dan panduan yang harus diikuti. Selain itu, model ini juga dapat dilakukan dengan cara disesuaikan dengan budaya, norma dan keinginan dari para pihak, termasuk didalamnya melibatkan aparaturnya penegak hukum.

c. Family and community group conferences

Model Family and community group conferences telah dikembangkan di Australia dan selandia baru. Model ini tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan korban serta warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti : polisi, jaksa dan hakim anak) dan

para pendukung korban.⁴⁵ Model ini dipergunakan dalam sistem peradilan pidana untuk pidana yang pelakunya adalah anak.

Model Family and community group conferences merupakan pengembangan dari model conferencing. Bedanya, kalau dalam conferencing pihak yang dilibatkan hanya sebatas sampai korban tidak langsung, sedangkan dalam Family and community group conferences masyarakat juga dapat dilibatkan. Selain itu kalau dalam conferencing, dipergunakan untuk semua tindak pidana sedangkan dalam Family and community group conferences untuk tindak pidana yang pelakunya adalah anak.⁴⁶

Oleh karena model ini dipergunakan untuk tindak pidana yang pelakunya anak, maka focus penyelesaiannya model ini ialah pemberian pelajaran atau pendidikan bagi pelaku atas apa yang telah dilakukannya pada korban. Dalam sebuah conferencing, kedua belah pihak (korban dan pelaku) membuat sebuah action plan yang berasal dari informasi korban, pelaku dan kalangan professional. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pencegahan agar suatu kesalahan tidak berulang lagi.

d. *Community panels meeting*

Model Community panels meeting merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal, dan sering melibatkan unsure mediasi atau negosiasi. Model ini dilakukan melalui sebuah pertemuan yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pelaku, korban dan orangtua pelaku untuk mencapai sebuah kesepakatan mengenai perbaikan kesalahan. Dalam model ini, komunitas masing-masing pihak yang diwakili oleh tokoh masyarakat dari

⁴⁵Barda Nawawi Arif, "Upaya Non-Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan" (Makalah Yang Disajikan Dalam Seminar Kriminologi VI, Semarang, 16-18 September 1981), h. 10.

⁴⁶Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, h.171.

masing-masing pihak, dilibatkan untuk merumuskan sebuah kesepakatan dalam rangka melakukan perbaikan atas kesalahan yang telah dilakukan pelaku.⁴⁷

e. Informal mediation

Model ini biasanya dilaksanakan oleh personil sistem peradilan pidana dalam tugas normalnya. Dalam hal ini, pada umumnya dilakukan oleh jaksa dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan.

Selain itu model ini juga dapat dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas (*probation officer*), oleh pejabat polisi, atau oleh hakim. Model informal mediation sudah biasa dilakukan dalam seluruh sistem hukum, dan sering kali adanya perdamaian di antara para pihak dapat dijadikan sebagai alasan gugurnya hak mengajukan penuntutan atau dapat dijadikan alasan oleh hakim untuk menyatakan penuntutan perkara tersebut tidak dapat diterima.⁴⁸

f. Traditional village or tribal moots

Model ini digunakan di beberapa Negara yang kurang maju dan wilayah-wilayah pedesaan/pedalaman. Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan yang terjadi di antara warganya. Model ini lebih memilih keuntungan bagi masyarakat luas, sedangkan model informal mediation bertujuan menghalangi sengketa untuk kepentingan pelaku dan korban sehingga yang diundang oleh jaksa atau mediator lainnya adalah pihak korban dan pelaku saja, tanpa melibatkan seluruh masyarakat.⁴⁹

g. Circles

⁴⁷Barda Nawawi Arif, "Upaya Non-Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan" (Makalah Yang Disajikan Dalam Seminar Kriminologi VI, Semarang, 16-18 September 1981), h. 9.

⁴⁸Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, h.172.

⁴⁹Barda Nawawi Arif, "Upaya Non-Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan" (Makalah Yang Disajikan Dalam Seminar Kriminologi VI, Semarang, 16-18 September 1981), h. 7.

Model ini diadopsi dari praktik Yukon, Kanada, yang dilaksanakan pertama kali pada tahun 1992. Model ini hampir sama dengan conferencing, yaitu dalam menyelesaikan perkara pidana, melibatkan para pihak yang terlibat, meliputi: pelaku, korban, keluarga korban dan keluarga pelaku, dan pihak lain yang terlibat termasuk di dalamnya aparat penegak hukum.⁵⁰ Perbedaannya ialah pihak yang dilibatkan dalam conferencing hanya sampai secondary victim yang meliputi keluarga dan kawan dekat korban dan pelaku, sedangkan dalam *Circles* setiap anggota masyarakat yang merasa berkepentingan dengan perkara tersebut dapat datang dan ikut berpartisipasi. Hal ini berarti *Circles* hampir sama dengan community panels meeting, hanya saja *Circles* digunakan secara umum, sedangkan community panel meeting untuk tindak pidana yang pelakunya adalah anak sebagaimana yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini.

Circles di sini didefinisikan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dengan tindak pidana secara luas dan semua pihak yang berkepentingan tersebut duduk dalam sebuah lingkaran. Pelaku biasanya mendapatkan kesempatan pertama untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya dan mereka yang hadir dalam lingkaran diberi kesempatan untuk bicara. Diskusi selanjutnya berpindah dari satu peserta ke peserta yang lain dalam tata urutan lingkaran, dan setiap orang dapat mengutarakan keinginannya, hingga semuanya mendapatkan kesempatan mengutarakan perasaannya dan dicapainya sebuah resolusi.

Tugas mediator dan fasilitator ialah memberikan penerapan agar masing-masing pihak mendapatkan pemahaman yang sama dan menjaga aturan main agar diskusi berjalan dengan kondusif. Diskusi berakhir apabila telah

⁵⁰Eva Achjani Zulfa dan KIndriyanto seno adji, *pergeseran paradigm pemidanaan* (Bandung: Lubuk agung, 2011), h. 91.

tercapai kesepakatan dan penyelesaian, baik itu berupa pemberian atau pembayaran restitusi atau ganti rugi; atau pemberian sanksi lainnya; atau dapat pula tanpa adanya sanksi; namun yang pasti harus ada pengampunan atau maafan yang diberikan korban dan masyarakat kepada pelaku.⁵¹

h. Reparative board/youth panel

Model ini dilakukan dengan melibatkan lembaga pendamping yang akan membahas tentang perencanaan program-program yang tepat dari keadilan restorative yang juga melibatkan pelaku dan korban. Program ini mulai dilaksanakan di Negara bagian Vermont pada tahun 1996 dengan lembaga pendamping *bureau of justice assistance*. Mediator yang memfasilitasi pertemuan adalah orang-orang yang sudah diberi pendidikan khusus mediasi.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari pengadilan. Selama pertemuan berlangsung, para peserta berdiskusi dengan pelaku tentang perbuatan negatifnya dan konsekuensi yang harus ditanggung oleh pelaku. Kemudian para peserta merancang sanksi yang didiskusikan dengan pelaku dalam jangka waktu tertentu untuk membuat perkiraan atas akibat tindak pidananya. Setelah program tersebut disepakati, selanjutnya keputusan yang dicapai hanya dilaporkan kepada pihak pengadilan untuk disahkan dan keterlibatan board menjadi berakhir.

Di samping berbagai model di atas, sebenarnya masih banyak lagi bentuk dan model penerapan *Restorative Justice*, seperti: *victim assistant* (pendamping korban), *ex-offender assistance* (pendampingan mantan pelaku), *restitution* (ganti rugi), dan *community service* (layanan masyarakat). Selain itu, di amerika serikat dan kanada, juga berkembang model *Restorative Justice*,

⁵¹ Bambang Waluyo, *desain fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*, h.174

yaitu (a) hak tahanan dan alternatif pemidanaan selain penjara, (b) pilihan penyelesaian sengketa, dan (c) advokasi.⁵²

Hak tahanan dan alternatif pemidanaan selain penjara: model ini memberikan hak kepada tahanan untuk mendapatkan alternatif pemidanaan selain pidana penjara guna menjamin seseorang agar dapat berkumpul dalam masyarakat. Selain itu, model ini juga dimaksudkan untuk mencegah meledaknya populasi penjara apabila semua perkara pidana diselesaikan dengan pemidanaan di penjara.

Pilihan penyelesaian sengketa: penyelesaian perkara dengan model ini dilakukan melalui suatu upaya informal yang difokuskan pada upaya negosiasi di antara para pihak, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, serta mengurangi ketergantungan peran para profesional hukum.

Advokasi: model ini dilakukan dengan memberikan advokasi kepada korban tindak pidana karena mereka kurang mampu bersuara dalam proses peradilan pidana.⁵³

4. *Restorative justice* sebagai tujuan pemidanaan.

Untuk lebih mengetahui lebih dalam mengenai *Restorative justice* sebagai tujuan dari pemidanaan, maka pada sub bab ini pembahasan akan dibagi menjadi pemidanaan, jenis pemidanaan dan tujuan pemidanaan

a. Pemidanaan

Menurut Sudarto, menyatakan bahwa penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menerapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.

⁵²I Made Agus Mahendra Iswara, "Mediasi panel penerapan nilai-nilai *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana adat di bali", h.47

⁵³Bambang Waluyo, *desain fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*, h.175

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa istilah penghukuman dapat dipersempit artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim.⁵⁴ Menurut Barada Nawawi Arif, syarat pemidanaan ada dua yang fundamental yaitu asas legalitas dan kesalahan. Dengan perkataan lain bahwa pemidanaan sangat erat hubungannya dengan pokok pemikiran mengenai tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana.⁵⁵

Andi Hamzah dalam bukunya menyatakan bahwa masalah penjatuhan pidana atau pemidanaan ini sangat penting dalam hukum pidana dan sistem peradilan pidana.⁵⁶ Menurut Andi Hamzah “penjatuhan pidana atau pemidanaan merupakan konkretisasi atau realisasi peraturan pidana dalam Undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.”⁵⁷ Andi Hamzah melanjutkan bahwa “hakim akan mempunyai keleluasaan luar biasa dalam memilih berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tertentu dalam kasus konkreto.”⁵⁸

b. Jenis pemidanaan

Pernyataan Andi Hamzah yang terakhir disebutkan kurang tepat, karena penjatuhan hukuman atau pemidanaan terkesan hanya pidana penjara, padahal

⁵⁴Muladi dan Barda Nawawi Arif, *teori-teori dan kebijakan pidana* (Cet. II; Bandung: Alumi, 1998), h. 1.

⁵⁵Barda Nawawi arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Cet. II; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 88.

⁵⁶Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*, (Cet. I; Jakarta : Pradnya Paramita, 1986), h. 72.

⁵⁷Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*, h. 73.

⁵⁸Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*, h. 74.

jenis pemidanaan masih ada yang lainnya. Jenis pemidanaan atau pidana menurut KUHP seperti dimaksud dalam pasal 10 dibagi dalam dua jenis yaitu:⁵⁹

- 1) Pidana pokok:
 - a) Pidana mati;
 - b) Pidana penjara;
 - c) Pidana Kurungan;
 - d) Pidana denda;
 - e) Pidana tutupan.
- 2) Pidana tambahan
 - a) Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b) Perampasan barang-barang tertentu;
 - c) Pengumuman putusan hakim.⁶⁰

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, disamping jenis sanksi yang berupa pidana dalam hukum pidana positif dikenal juga jenis sanksi yang berupa tindakan, misalnya:⁶¹

- a) Penempatan di rumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan Karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit (lihat pasal 44 ayat (2) KUHP);
- b) Tentang tindakan terhadap anak. Muladi masih mengacu kepada KUHP karena pada waktu itu memang belum ada Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak yang mencabut pasal 45 KUHP, bahkan sekarang telah hadir Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak;

⁵⁹R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politea, 1994), h. 34.

⁶⁰Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 243.

⁶¹Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, h. 45-46.

- c) Menempatkan di tempat bekerja Negara bagi penganggur yang malas bekerja dan tidak mempunyai mata pencaharian, serta mengganggu ketertiban umum dengan melakukan pengemisan, bergelandangan atau perbuatan sosial.

c. Tujuan pemidanaan

Tujuan pemidanaan yang dimaksudkan adalah teori penjatuhan pidana atau teori pemidanaan. Ada tiga golongan utama untuk membenarkan penjatuhan pidana:⁶²

1) Teori absolute atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori ini mengatakan bahwa setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelaku, secara historis tujuan pemidanaan dengan teori pembalasan (*retributive theory*). Menurut teori ini, alasan pembeda dalam penjatuhan hukuman, hukuman semata-mata sebagai imbalan dari perbuatan jahat, pananganan teori Retributive sebagai tujuan hukum yang paling tua, hukuman hanya diperuntukkan bagi pelaku kejahatan itu sendiri. Dalam hal ini setiap individu manusia itu bertanggung jawab atas setiap apa yang dilakukannya.⁶³

2) Teori relatif

Teori relatif atau tujuan mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan pidana untuk prevensi terjadinya kejahatan. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan, pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.⁶⁴ Muladi dan Barda Nawawi arief

⁶²Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*, h. 74.

⁶³Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana* (Jakarta: Indhill CO, 2007), h. 8-9.

⁶⁴Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, h. 16.

menambahkan bahwa “pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut sebagai teori tujuan(*utilitarian theory*).”⁶⁵

3) Teori gabungan

Teori gabungan merupakan gabungan dari teori Absolute dan Relatif.

Teori ini dibagi menjadi 3 yaitu:

- a) Yang menitikberatkan pada pembalasan;
- b) Yang menitikberatkan kepada pertahanan tata tertib masyarakat/prevensi seimbang;
- c) Yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

Menurut Andi Hamzah belum banyak sarjana yang membahasnya , namun dalam rancangan KUHP Nasional telah diatur tentang tujuan penjatuhan pidana, yaitu:⁶⁶

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan penegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b) Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat;
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Menjadi pertanyaan sekarang, termasuk kategori yang manakah konsep *Restorative justice*? Menurut Kathleen Daly sebagai berikut:⁶⁷

⁶⁵Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, h. 17.

⁶⁶Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*, h. 23-24.

⁶⁷Kathleen Daly, *Restorative Justice Philosophy To Practice*, (United Kingdom: Dartmouth Publishing Company, 2000), h. 36.

“ada perbedaan lebih jelas daripada nyata, antara praktik peradilan trsdisional dan Restorative. Keadilan restorative, korban mengambil peran yang lebih utama dalam proses penyelesaiannya dan penekanannya adalah pada memperbaiki kerusakan antara pelaku dan korban, anggota masyarakat atau organisasi mengambil peran yang lebih aktif dalam proses peradilan, bekerja sama dengan Negara, dan proses melibatkan dialog dan negosiasi antara para pihak dalam sengketa.”

Penggabungan antara teori Absolute dan Relatif, kemudian dikembangkan oleh Muladi dengan menyebutnya dengan teori integrative, menurutnya karena tujuannya bersifat integrative maka perangkat tujuan pembedanaan adalah:⁶⁸

- a) Pencegahan umum dan khusus; salah satu tujuan utama pembedanaan terhadap pelaku tindak pidana mencegah atau menghalangi pelaku tindak pidana tersebut dan juga orang lain yang mungkin punya maksud untuk melakukan kejahatan-kejahatan semacam karenanya mencegah kejahatan lebih lanjut;
- b) Perlindungan masyarakat, sebagai tujuan pembedanaan mempunyai dimensi yang bersifat luas, karena secara fundamental ia merupakan tujuan pembedanaan. Secara sempit hal ini digambarkan sebagai kebijaksanaan pengadilan untuk mencari jalan melalui pembedanaan agar masyarakat terlindung dari bahaya pengulangan tidak pidana;
- c) Memelihara solidaritas masyarakat, pembedanaan bertujuan untuk menegakkan adat istiadat masyarakat dan mencegah balas dendam dalam perseorangan.

⁶⁸Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (cet.III; Bandung: Alumni, 1984), h. 81.

M. Solehuddin mencoba menyimpulkan tentang teori integratif dari Muladi tersebut, yang menurut penulis di sinilah fungsi *Restorative justice* sebagai tujuan pemidanaan, yaitu:⁶⁹

“teori tujuan pemidanaan integratif tersebut berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.”

D. Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak yang melakukan tindak pidana akan berhadapan dengan instrumen negara melalui aparaturnya. Sebagai sebuah instrumen pengawasan sosial, hukum pidana menyandarkan diri pada sanksi karena pada fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan atau hak milik mereka. Invasi terhadap hak dasar ini dibenarkan demi melestarikan masyarakat dan melindungi hak-hak fundamental dari gangguan orang lain.⁷⁰

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia berasaskan sebagai berikut:

1. Perlindungan, yaitu meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.
2. Keadilan, yaitu bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.
3. Nondiskriminasi, yaitu tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak serta kondisi fisik dan/atau mental.

⁶⁹M. Solehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), h. 51.

⁷⁰Budi Setiawan, “Penyelesaian Perkara Dengan Pendekatan *Restorative justice* Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak”, *Skripsi* (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2015), h. 35.

4. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
5. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan terhadap anak dalam menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak.
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, yaitu hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
7. Pembinaan dan pembimbingan anak, yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada tuhan yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan prilaku.
8. Proporsional, yaitu segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur dan kondisi anak.
9. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir, dan;
10. Penghindaran pembalasan, yaitu menjauhkan prinsip pembalasan dalam proses peradilan pidana anak.⁷¹

Setyo wahyudi mengemukakan bahwa bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak. Terhadap apa yang dimaksud

⁷¹Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Bab I, Pasal 2.

dengan sistem peradilan pidana anak tersebut, Undang-undang nomor 11 tahun 2011 sama sekali tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.⁷²

Hanya saja dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa SPPA adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Dapat diketahui bahwa apa yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-undang adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum harus dilaksanakan sebagai suatu sistem dengan menurut pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.⁷³

Sistem peradilan pidana anak mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Sistem peradilan pidana anak terdiri atas komponen atau subsistem yang berupa:
 - a. Penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik, yaitu pejabat polisi sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - b. Penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, yaitu jaksa sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - c. Pemeriksaan sidang yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan tingkat banding, yaitu sebagaimana dimaksud oleh pasal 50 dan pasal 51 ayat (1) Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum
 - d. Petugas kemasyarakatan yang terdiri atas:

⁷²Setyo Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), h. 16.

⁷³R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, h. 22.

- 1) Pembimbing kemasyarakatan;
- 2) Pekerja sosial profesional;
- 3) Tenaga kesejahteraan sosial;

Sebagaimana yang dimaksud dalam 63 Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.⁷⁴

2. Komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak tersebut dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya saling berhubungan satu sama lain dalam suatu pola saling ketergantungan seperti yang ditentukan dalam atau mengikuti hukum acara peradilan anak, yaitu dalam bab III dari Undang-undang nomor 11 tahun 2012. Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial, sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.⁷⁵

3. Keseluruhan sistem peradilan pidana anak lebih dari sekedar penjumlahan dari komponen-komponennya, dalam pengertian sistem peradilan pidana anak yang terpenting bukanlah kuantitas suatu komponen melainkan kualitas dari komponen tersebut. Terdapat empat komponen dalam sistem peradilan pidana anak yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang diharapkan kesemua komponen tersebut dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu *integrated criminal justice system*.⁷⁶

⁷⁴R.Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, h. 25.

⁷⁵Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana* (Bandung: Binacipta, 1996), h. 15

⁷⁶R.Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, h. 27.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang menggabungkan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. *Law in book* adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan, keduanya seiring berbeda, artinya hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Sedangkan penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

2. Lokasi penelitian.

Lokasi penelitian ini yaitu di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dengan difokuskan pada Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar.

B. Metode Pendekatan

Spesifikasi pendekatan pada penelitian ini menggabungkan antara pendekatan kasus (*Case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*).

1. Penelitian yang menggunakan pendekatan kasus (*Case approach*) berarti penelitian yang menekankan untuk dilakukannya telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang terjadi di lapangan.
2. Sedangkan penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) berarti mengkaji tentang perundang-undangan dan peraturan-peraturan dengan teori-teori hukum mengenai penerapan aturan. Pendekatan penelitian tersebut juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau bahan hukum yang lain, sebagai peneliti pustakawan atau peneliti dokumen disebabkan peneliti ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

C. Sumber Data

1. Data primer.

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa ada perantara. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu :

a. Metode wawancara

Wawancara yaitu tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Teknik wawancara dilakukan dengan cara mendatangi secara

langsung informan untuk dimintai keterangan mengenai sesuatu yang diketahuinya, bisa mengenai suatu kejadian, fakta atau pendapat informan itu sendiri.

b. Metode observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang diteliti.

2. Data sekunder.

yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, majalah jurnal, karya ilmiah, internet, dan berbagai sumber lainnya.

D. Metode Pengumpulan Data

Di dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan tehnik pengumpulan data, sebagai berikut :

1. Teknik wawancara.

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi.¹ Yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²

2. Observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.³ Sedangkan tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan perilaku objek serta memahaminya atau bisa juga hanya ingin

¹I Made Wiratha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006), h. 37

²Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007), h. 186

³Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm. 142

mengetahui frekuensi suatu kejadian.⁴ Pada metode ini peneliti akan melakukan pengamatan pada proses masuknya perkara hingga selesainya perkara tersebut khususnya yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

3. Dokumentasi.

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, artefak, foto, dan sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan flashdisk, data tersimpan di website, dan lain-lain. Gottschalk menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.⁵ Pada metode ini peneliti akan mengambil dokumentasi di Kepolisian Resort Kota Makassar.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “divalidasi”. Validasi terhadap peneliti, meliputi; pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan

⁴I Made Wiratha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, h. 37

⁵Gottschalk, Louis. *Understanding History; A Primer of Historical Method* (terjemahan Nugroho Notosusanto). (Jakarta: UI Press.1998), h. 127

terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian - baik secara akademik maupun logikanya⁶

Peneliti kualitatif sebagai *human instrumen* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.⁷

Selain dari pada itu, juga diperlukan instrument penelitian berupa:

1. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara berfungsi sebagai alat pengarah dalam mengumpulkan data dari informan pada saat dilakukan wawancara.

2. Handphone

Penggunaan alat komunikasi berupa handphone yang memiliki spesifikasi dan fitur yang dapat membantu dalam penelitian ini, utamanya aplikasi Kamera Video, Kamera Foto dan Juga Recorder Suara.

3. Alat Tulis

Alat tulis dalam sebuah penelitian sangat diperlukan dalam proses penelitian, hal ini guna mempermudah dalam proses pengumpulan data sementara dalam bentuk tulisan untuk selanjutnya diolah.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengolahan data yaitu:

1. Reduksi Data ialah proses mengubah data kedalam pola, fokus, kategori, atau pokok permasalahan tertentu.
2. Penyajian Data ialah menampilkan data dengan cara memasukkan data dalam bentuk yang di inginkan seperti memberikan penjelasan dan analisis.

⁶Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Alfa Beta, 2009), h. 305

⁷Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, h. 306

3. Pengambilan Kesimpulan ialah mencari simpulan atas data yang direduksi dan disajikan.

Analisis data yang digunakan yakni analisis kualitatif yaitu teknik pengolahan data kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam rangka mendeskripsikan/ membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual dan teoretik, serta mengolah data dan menyajikan dalam bentuk yang sistematis, teratur dan terstruktur serta mempunyai makna. Analisis data tidak hanya dimulai saat sebelum dan setelah penelitian, namun dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Hal ini disertai dengan identifikasi dan pemilahan terkait data yang dianggap penting dan berhubungan dengan fokus penelitian.

G. Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini meliputi *Credibility* (validasi internal), *Transferability* (validasi eksternal), *Dependability* (reabilitas), dan *Confirmability* (obyektivitas).

1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas antara lain dilakukan dengan cara yaitu:⁸

a. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan dilakukan untuk menguji kredibilitas data yang telah diperoleh, apakah data yang telah diperoleh telah berubah atau tidak.

b. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

c. Menggunakan Bahan Referensi

⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012) h.37

Bahan referensi merupakan pendukung yang dapat membuktikan data yang telah ditemukan, seperti rekaman wawancara.

2. Pengujian Transferability

Pengujian Transferability merupakan validasi eksternal, digunakan agar hasil penelitian dapat digunakan dapat diterapkan. Pengujian ini dilakukan dengan membuat laporan yang diurai secara jelas, rinci dan sistematis.

3. Pengujian Defendability

Dalam penelitian kualitatif, uji defendability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses oleh auditor yang independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan kegiatan peneliti dalam melakukan penelitian

4. Pengujian Confirmability

Dalam penelitian ini uji confirmability dilakukan bersamaan dengan uji defendability, karena pengujian ini harus melibatkan orang lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Melatarbelakangi Anak Melakukan Tindak Pidana

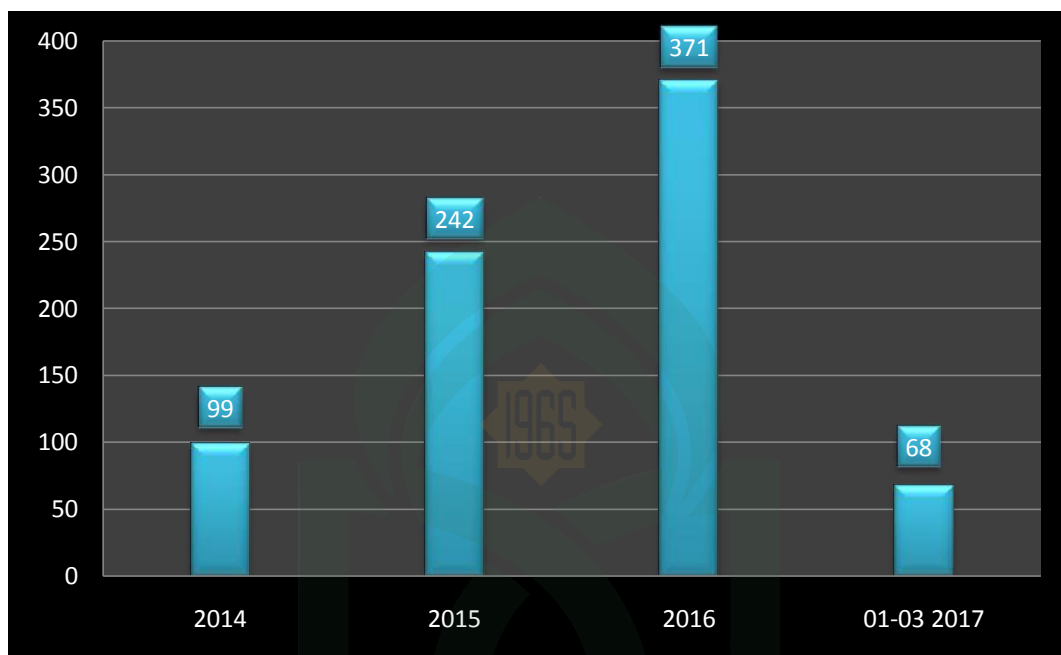
Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Makassar ditemukan bahwa terdapat banyak kasus tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pelakunya yang jika digambarkan dalam bentuk tabel akan tergambar sebagai berikut:

Tabel 4.1 data perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar sejak tahun 2014 – maret 2017.

No	Jenis Tindak Pidana	Tahun			
		2014	2015	2016	01-03 2017
1	Pencurian	66	118	231	47
2	Narkotika	16	24	43	9
3	Tindak pidana senjata api atau benda tajam	9	61	59	9
4	Kejahatan terhadap keteriban umum	-	7	6	-
5	Perjudian	1	4	4	-
6	Kejahatan terhadap nyawa	2	2	6	-
7	Kejahatan terhadap kesusilaan	1	4	5	-
8	Penganiayaan	3	17	14	3
9	Penadahan	-	3	-	-
10	Pemerasan dan pengancaman	-	1	2	-
11	Penggelapan	1	1	1	-
Jumlah Setiap tahunnya		99	242	371	68
Total		780			

Sumber: data Pengadilan Negeri Makassar

Data perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar sejak tahun 2014 – maret 2017 dapat di gambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.1 data perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar sejak tahun 2014 – maret 2017

Dari keseluruhan kasus tersebut di atas terdapat 110 kasus yang diselesaikan dengan jalan diversi atau pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana dimana diversi itu sendiri merupakan bagian dari *Restorative Justice*. Selanjutnya terdapat 91 kasus yang mendapatkan putusan akhir dengan amar putusan di kembalikan kepada Pemerintah/Negara untuk di didik agar anak tersebut kembali menjadi anak yang lebih baik di mana hal ini merupakan salah satu tujuan dari *Restorative Justice*. Selain dari itu, juga terdapat 4 kasus yang mendapatkan putusan akhir dengan amar putusan dikembalikan kepada orangtua.

Salah satu putusan yang amarnya dikembalikan kepada Pemerintah/Negara adalah kasus pencurian yang dilakukan oleh anak yang berinisial JC dengan nomor register perkara 274/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks. Dengan dakwaan sebagai berikut:

.....Bahwa **Anak JODY CHANDRA Als JODI Bin TJIANG GUI Kiang** bersama-sama dengan **RUSDI Als NENE** (belum tertangkap / masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekitar jam 10.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2016 bertempat di Jalan Satangnga Kecamatan Wajo Kota Makassar, atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *mengambil barang sesuatu berupa dompet warna merah yang berisi uang tunai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) serta alat make up pengantin yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu HERAWATI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*.....

.....Akibat perbuatan **Anak JODY CHANDRA Als JODI Bin TJIANG GUI Kiang** saksi korban Herawati mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.....

-----erbuatan **Anak JODY CHANDRA Als JODI Bin TJIANG GUI Kiang** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.....

Dan salah satu kasus yang diselesaikan dengan jalan diversi adalah kasus pencurian yang dilakukan oleh anak yang berinisial IB dengan nomor register perkara 251/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks. dengan dakwaan sebagai berikut:

.....Bahwa ia anak **INDRA BAHRI Alias INDRA BIN BAHRI** bersama-sama dengan lelaki **RIANTO Alias RIAN**, lelaki **ANGGARA BAYU SAPUTRA**, lelaki **DAUD RURU PALINGGI**, dan lelaki **HARUN PATI** (yang penuntutannya di ajukan dalam berkas perkara lain) pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar jam 02.30 wita atau setidaknya-tidaknya waktu lain dalam bulan September tahun 2016 bertempat di Jalan Rajwali III (Kantin Menwa) Kec Mariso Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, anak telah mengambil sesuatu barang berupa 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 3 (tiga) kaleng rokok (yang berisi bermacam-macam batang rokok segala merek) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban **MULYA BINTI SARAPPI** dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu dan untuk mencapai barang yang akan di ambilnya dengan jalan menggunakan kunci palsu.....

..... Perbuatan Anak **INDRA BAHRI Alias INDRA BIN BAHRI** tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4,5 KUHP.

Selain daripada itu kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak berada diurutan ke tiga terbanyak dari keseluruhan kasus tindak pidana yang diproses di Pengadilan Negeri Makassar dengan jumlah 780 kasus dari 49.987 jumlah total kasus sejak tahun 2014 sampai dengan bulan maret 2017. Dengan data lengkap sebagai berikut:

Tabel 4.2 persentase jumlah kasus pidana di Pengadilan Negeri

Makassar sejak tahun 2013 s/d maret 2017

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Kasus	Persentase
1	Pidana Biasa (Pidum)	6.913	13,8 %
2	Pidana Singkat (Pidum)	0	0 %
3	Pidana Cepat (Pidum)	0	0 %
4	Pidana Lalu Lintas (Pidum)	41.923	83,8 %
5	<i>Pidana Anak (Pidsus)</i>	780	1,5 %
6	Pidana Korupsi (Pidsus)	371	0,7 %
7	Pidana Perikanan (Pidsus)	0	0 %
8	Pidana HAM (Pidsus)	0	0 %

Sumber: data Pengadilan Negeri Makassar

Data persentase jumlah kasus pidana di Pengadilan Negeri Makassar sejak tahun 2013 s/d maret 2017 juga dapat di gambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.2 Persentase jumlah kasus pidana di Pengadilan Negeri

Makassar sejak tahun 2013 s/d maret 2017

Banyaknya kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar pasti memiliki alasan atau sebab tertentu kenapa seorang anak melakukan tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 30 november 2016 dengan Widiarso¹ dan Nina Purwati² pada tanggal 21 november 2016 maka dapat ditarik beberapa faktor penyebab anak melakukan tindak pidana seperti:

1. Faktor kemiskinan.

Lemahnya ekonomi keluarga menjadi pendorong bagi anak untuk melakukan perbuatan pidana di Kota Makassar. Hal ini sering terjadi pada keluarga kelas menengah kebawah yang pada umumnya hanya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dalam batas minimum. Bahkan kadang-kadang untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya seorang anak harus ikut berpartisipasi dalam mencari nafkah demi mempertahankan hidup mereka. Dengan kondisi yang seperti ini orang tua secara otomatis kurang dapat mengawasi anak-anaknya sehingga kadang untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri seorang anak melakukan perbuatan yang tidak benar.

Latar belakang ekonomi keluarga yang tidak mampu memenuhi segala kebutuhan anak menyebabkan anak mencari pemenuhan kebutuhannya dari lingkungan luar. Bahwa banyaknya kebutuhan skunder seorang anak seperti keinginan untuk memiliki barang-barang mewah sebagai penunjang pergaulannya bersama teman sebayanya seperti keinginan untuk memiliki telepon pintar (*smart phone*) yang pada dasarnya barang tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi setiap kalangan terlebih lagi bagi kalangan

¹Widiarso (55 tahun), Hakim Pengadilan Negeri Makassar , *Wawancara*, Makassar, 30 November 2016.

²Nina Purwati (35 tahun), Kasubnit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Sat Resrim Polrestabes Makassar, *Wawancara*, Makassar, 28 November 2016.

masyarakat yang memiliki perekonomian rendah, dan karena ketidak mampuan orang tua untuk memenuhi keinginan anak tersebut sehingga tidak jarang seorang anak mencari jalan pintas untuk memenuhi keinginannya tersebut dengan cara melakukan kejahatan seperti mencuri dan melakukan pembegalan.

Nina purwati³ menjelaskan bahwa sebagian besar dari anak yang menjadi pelaku tindak pidana di Kota Makassar memiliki latar belakang perekonomian yang rendah terkhusus anak pelaku tindak pidana pencurian yang dimana kasus tindak pidana pencurian adalah kasus yang paling sering dilakukan oleh anak di wilayah hukum pengadilan Negeri Makassar dengan jumlah 462 kasus sejak tahun 2014 sampai dengan bulan maret 2017 .

Salah satu contoh kecilnya adalah kasus pencurian Kotak amal masjid nurul iman di jl. Boulevard pada tanggal 24 november 2016 yang dilakukan oleh seorang anak remaja berinisial Ant yang masih berumu 15 tahun yang mengaku terpaksa mencuri karena kelaparan.

2. Faktor rendahnya pendidikan.

Widiarso⁴ menjelaskan bahwa Sekolah merupakan tempat pendidikan formal bagi seorang anak mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar sederajat, sekolah menengah pertama sederajat dan sekolah menengah atas sederajat yang bertujuan untuk mengajarkan anak dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya baik dibidang pengetahuan umum maupun pengetahuan agama. Namun demikian di Kota Makassar yang merupakan salah satu Kota besar di Indonesia tidak jarang kita dapatkan seorang anak yang putus sekolah dikarenakan kekurangan biaya ataupun karena dari dalam diri

³Nina Purwati (35 tahun), Kasubnit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polrestabes Makassar, *Wawancara*, Makassar, 28 November 2016.

⁴Widiarso (55 tahun), Hakim Pengadilan Negeri Makassar , *Wawancara*, Makassar, 30 November 2016.

anak tersebut yang tidak ingin mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Yang mengakibatkan seorang anak memiliki latar belakang pendidikan yang rendah.

Latar belakang pendidikan yang rendah itulah yang kemudian menjadi faktor anak melakukan kejahatan di Kota Makassar sebab pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat karena semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin pintar pula dalam bertutur kata maupun bertindak dan begitupula sebaliknya, anak yang seharusnya merasakan suka duka di bangku sekolah justru harus berhenti sekolah cenderung membuat mental anak menjadi semakin labil dan mudah sekali tersinggung. Merasa berbeda dengan anak seusianya yang sekolah, merasa minder dan malu untuk bergaul sehingga membuat seorang anak seringkali terpengaruh untuk melakukan tindak pidana seperti tindak pidana pengeroyokan.

Terdapat banyak manfaat dari pendidikan beberapa di antara adalah:

a. Memberikan informasi dan pemahaman

Manfaat yang paling pertama dari pendidikan adalah untuk memberikan informasi dan pemahaman bagi setiap peserta didik. Hal ini merupakan salah satu hal yang paling penting dan merupakan tujuan dan manfaat utama dari pendidikan.

b. Menciptakan generasi penerus bangsa

Manfaat pendidikan yang kedua adalah menciptakan generasi penerus bangsa yang cerdas dan ahli dalam berbagai bidang. Hal ini berhubungan dengan banyaknya bidang ilmu pengetahuan dan juga penjurusan yang ada sehingga dapat membantu melahirkan generasi muda yang berguna bagi masyarakat sesuai dengan disiplin ilmu yang didalamnya.

c. Mencegah terbentuknya generasi yang bodoh

Manfaat ketiga dari pendidikan adalah untuk mencegah terbentuknya generasi yang bodoh, dunia pendidikan merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk menghindari pembodohan karena dengan adanya pendidikan maka seseorang akan semakin memahami hal yang buruk dan benar sehingga dapat mencegah berbagai macam tindakan bodoh yang dapat merugikan banyak pihak.

d. Mencegah terjadinya tindak kejahatan

Sebagaimana pembahasan sebelumnya bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang yang dibarengi dengan moral dan etika yang baik maka akan semakin pintar pulalah dalam bertutur kata dan bertindak sehingga dapat mencegah seseorang untuk melakukan tindak kejahatan.

3. Faktor pengaruh negatif lingkungan Pergaulan.

Masyarakat merupakan salah satu tempat pendidikan seorang anak setelah pendidikan dalam keluarga dan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Karena anak selain berinteraksi dengan anggota keluarga juga memasuki lingkungan pergaulan yang lebih luas yaitu lingkungan pergaulan dalam masyarakat. Dengan demikian tidak jarang kita temukan anak di Kota Makassar yang salah dalam bergaul dan memiliki mental penjahat yang diakibatkan oleh pengaruh negatif dari masyarakat sekitarnya.

Pergaulan anak menjadi penting untuk membentuk karakter dan pertumbuhan mentalnya. Anak sering salah bergaul justru membuatnya semakin dekat dengan kejahatan. Anak yang sekolah bergaul dengan orang yang lebih dewasa yang justru kadang mengajari anak tersebut hal-hal yang buruk seperti merokok, mencuri, bertengkar, dan sebagainya.

Terdapat banyak daerah di Kota Makassar yang telah dikenal sebagai daerah yang memiliki tingkat kejahatan yang tinggi sehingga berakibat pada ketakutan masyarakat umum terhadap daerah tersebut sekalipun hanya sekedar melintas. Daerah-daerah yang seperti inilah yang dapat memberikan pengaruh negatif bagi seorang anak bahkan sampai anak menggunakan narkoba.

4. Faktor pengaruh negatif perkembangan teknologi.

Saat ini hampir sebagian besar anak-anak di Indonesia khususnya Kota Makassar telah mengerti dan menggunakan internet dalam kehidupan sehari-harinya baik untuk mengerjakan tugas dari sekolah maupun hanya untuk memainkan permainan yang ada di dalamnya. Kehadiran internet tidak hanya memberikan manfaat namun juga dapat memberikan dampak negatif bagi penggunanya. Dimana penggunanya pun tidak mengenal batas usia, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa. Salah satu kelemahan internet paling nyata merusak adalah hal-hal yang berbau asusila dengan mudahnya diakses di jaringan internet.

Nina Purwati⁵ menjelaskan bahwa Semakin berkembangnya teknologi mempengaruhi perkembangan Anak di Kota Makassar terlebih lagi Makassar adalah Kota yang besar, seperti kecanduan main *Game online* di warung internet (Warnet). Anak sering lupa waktu ketika bermain game, uang jajan dari orangtua tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya untuk bermain game, sehingga menjadikan anak mencari uang jajan tambahan, menggunakan uang sekolah untuk bermain game di Warnet salah satu cara yang dilakukan anak demi terwujudnya keinginannya untuk bermain game, kemudian untuk menutupi semua perbuatannya anak menjadi pelaku pidana seperti melakukan

⁵Nina Purwati (35 tahun), Kasubnit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polresta Makassar, *Wawancara*, Makassar, 28 November 2016.

pencurian. hal ini menunjukkan gejala perilaku kenakalan pada remaja yang mengarah ke perubahan dan sikap anak.

Widiarso⁶ menjelaskan bahwa dampak negatif yang paling nyata dari perkembangan teknologi bagi anak di Kota Makassar adalah yang berkaitan dengan pornografi, anggapan yang mengatakan bahwa internet identik dengan pornografi memang tidak salah. Karena dengan kemampuan internet dalam menyampaikan informasi yang dapat diakses oleh semua kalangan termasuk anak di bawah umur seringkali disalahgunakan untuk mengakses hal-hal yang berbau pornografi yang dapat mempengaruhi seorang anak untuk mencoba dari apa yang dilihatnya dari internet tersebut yang dapat berujung pada tindak kejahatan seperti percabulan.

Menurut Kasubnit PPA Sat Reskrim Polrestaber Makassar saat diwawancarai pada tanggal 28 November 2016 menjelaskan bahwa terdapat banyak dampak negatif lain dari internet khususnya bagi anak-anak di Kota Makassar beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Perkelahian, sebagai akibat dari kecanduan *game online* yang bertemakan kekerasan dan peperangan yang seringkali ditiru oleh anak;
- b. Perkataan kotor, kasar, tidak senonoh, saling mengejek antar teman yang bermula dari penulisan status di media sosial seperti *facebook*, *twitter*, *blackberry messenger*, dan jejaring sosial yang lainnya;
- c. Perjudian, karena di media internet banyak menyediakan permainan-permainan yang mengarah pada perjudian seperti permainan poker;
- d. Mempengaruhi gaya hidup dan pergaulan karena melihat. Mencontoh, meniru perkembangan dari Negara lain melalui internet seperti halnya genk-genk motor;

⁶Widiarso (55 tahun), Hakim Pengadilan Negeri Makassar , Wawancara, Makassar, 30 November 2016.

- e. Berbohong kepada orang tua, karena dengan kecanduan internet akan membutuhkan biaya yang lebih banyak sehingga mempengaruhi anak untuk meminta biaya dengan cara berbohong dengan mengatas namakan keperluan sekolah.

B. Dasar Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar

Kasubnit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Restabes Makassar menjelaskan bahwa Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar nilai-nilai tanggungjawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan dan berfokus pada perbaikan terhadap kerugian akibat suatu kejahatan, di samping berusaha mendorong pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, melalui pemberian kesempatan para pihak yang terdampak langsung oleh kejahatan yaitu korban, pelaku dan masyarakat, dengan mencari dan memperhatikan kebutuhannya setelah terjadinya kejahatan, dan mencari suatu pemecahan berupa penyembuhan, perbaikan dan pembaharuan serta mencegah kerugian selanjutnya.

Restorative justice bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku, dan masyarakat berkepentingan (*stakeholders*) melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku.

Widiarso⁷ ketika ditanya mengenai pentingnya *Restorative justice* menjelaskan bahwa proses peradilan pidana yang sifatnya restoratif memiliki pandangan bahwa mewujudkan keadilan bukan hanya urusan pemerintah dan pelaku kejahatan, tetapi lebih dari itu harus memberikan keadilan secara

⁷Widiarso (55 tahun), Hakim Pengadilan Negeri Makassar , Wawancara, Makassar, 30 November 2016.

totalitas yang dan tidak boleh mengabaikan kepentingan dan hak-hak dari korban dan masyarakat. Dilain pihak dalam proses peradilan pidana konvensional kepentingan korban seolah-olah telah terwakili oleh Negara melalui Pemerintah dan pemerintah melalui Kejaksaan dan Kepolisian.

Nina purwati⁸ juga menjelaskan bahwa substansi mendasar dari UU No. 11 Tahun 2012 khususnya pada pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan *Restorative justice* adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga terhindar dari julukan anak nakal oleh masyarakat dan dengan demikian diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Pengertian diversi ditentukan dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2012 yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, dan menurut Pasal 5 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012 ditentukan bahwa dalam sistem peradilan pidana (SPP) Anak wajib diupayakan diversi. Upaya diversi dilakukan dalam setiap tahap SPP Anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan.

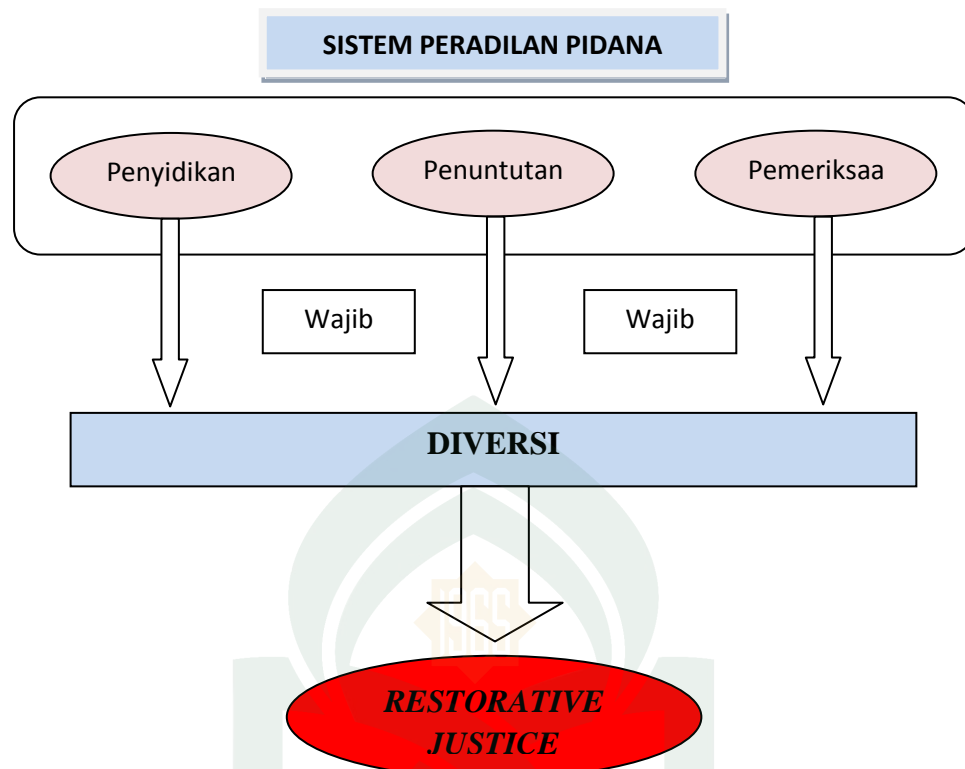
Penerapan konsep *Restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak merupakan perintah yang sah, jelas dan tegas berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pertimbangan undang-undang ini antara lain dikatakan, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan

⁸Nina Purwati (35 tahun), Kasubnit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polresta Makassar, *Wawancara*, Makassar, 28 November 2016.

martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Baik Widiarso dan Nina Purwati menjelaskan bahwa yang menjadi dasar perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah karena telah terjadi kegagalan Sistem Peradilan Pidana Anak untuk memberikan keadilan bagi anak, dan tingkat tindak pidana serta pengulangan tindakan pidana (*residivisme*) anak tidak mengalami penurunan di Kota Makassar yang berarti menunjukkan bahwa proses peradilan gagal memberlakukan anak sebagai orang yang masih kecil dan memerlukan perlindungan atas hak-haknya sebagai anak. Sehingga desakan untuk merubah sistem peradilan bagi anak semakin menguat ditambah dengan perkembangan pemikiran mengenai hak asasi manusia dan anak yang berimbas pada perubahan paradigma mengadili dari konsep *retributive justice* menjadi *Restorative justice* terhadap kasus anak dengan ditandai lahirnya undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang lebih berpihak pada kepentingan dan hak-hak anak.

Dari berbagai pemahaman atas perkembangan sistem hukum yang ada, termasuk yang terdapat pada sistem Hukum Islam maka hal tersebut diadopsi juga Di dalam UU SPPA yang pelaksanaan program *Restorative justice* dalam peradilan anak ditempuh dengan proses diversi. Pada Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012 mewajibkan Sistem Peradilan Pidana Anak mengutamakan pendekatan keadilan restorative



Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa di dalam sistem peradilan pidana anak pada tahap penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan serta pemeriksaan di persidangan wajib dilakukan diversifikasi yang tidak lain merupakan bagian dari konsep *Restorative justice*.

C. Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Dalam Menerapkan Konsep Restorative Justice Pada Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar

Dalam surat keputusan Kapolri No.Pol. : SKEP/180/III/2006 tentang buku pedoman pelaksanaan tugas bintang Polri di lapangan berbunyi tugas pokok reserse Polri adalah melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan koordinasi serta pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) berdasarkan undang-undang no. 8 tahun 1981 dan peraturan perundangan lainnya. Unit reserse berfungsi menyelenggarakan segala usaha, kegiatan, dan pekerjaan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi reserse kepolisian dalam

rangka penyidikan tindak pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku, koordinator PPNS, dan pengelolaan pusat informasi kriminal (PIK).

Satuan Reserse Kriminal (satreskrim) Polrestabes Makassar merupakan kesatuan yang dipimpin oleh kepala kesatuan (kasat) yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Polrestabes Makassar (kapolrestabes). Tugas pokok satreskrim Polrestabes Makassar tidak jauh berbeda dari surat keputusan Kapolri No.Pol. : SKEP/180/III/2006 yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, penindakan terhadap pelaku tindak pidana.

untuk membantu dan mempermudah megungkap kasus-kasus tindak pidana, anggota satreskrim mempunyai wewenang khusus bernama diskresi. diskresi kepolisian merupakan jiwa dari pengambilan keputusan oleh personel kepolisian dari tingkat yang paling rendah ke tingkat yang paling tinggi menurut pertimbangan moral dari personel itu sendiri.

Diskresi kepolisian selalu berada dalam lingkup pelaksanaan tugas kepolisian, diskresi akan selalu terkait dengan pengambilan keputusan atau kewenangan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap persoalan yang dihadapi. Diskresi kepolisian digunakan oleh personel kepolisian sejak permulaan ketika menghadapi suatu situasi tertentu. penggunaan diskresi itu berdasarkan pada penilaian yang berakhir dengan tindakannya.

Karena diskresi kepolisian didasarkan pada pertimbangan subjektif, etika dan moral personel itu sendiri, maka ada kemungkinan di dalamnya terjadi tindakan diluar wewenang personel kepolisian dalam implementasi diskresi tersebut.

Kompol Burhanuddin⁹ menjelaskan bahwa. Pada dasarnya diskresi kepolisian terdiri dari dua jenis, yaitu :

⁹Burhanuddin , Kepala Bagian Hukum Polrestabes Makassar, *Wawancara*, Makassar, 28 November 2016.

- a. Diskresi bebas, yang berarti kebebasan personel kepolisian untuk mengambil tindakan apa saja asalkan tidak bertentangan atau melanggar batas-batas yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Diskresi terikat, yang berarti kebebasan personel kepolisian untuk memilih salah satu alternatif yang ditetapkan oleh undang-undang.

Diskresi sendiri didasarkan pada asas *plichmatigheid*, yang berarti asas yang menyatakan bahwa tindakan polisi dianggap sah apabila didasarkan pada kekuasaan atau wewenang umum. Karena kekuasaan dan wewenang umum diskresi yang dilaksanakan personel kepolisian adalah *Atribusi* yang merupakan wewenang langsung yang diberikan oleh undang-undang, maka dalam pelaksanaan diskresi personel kepolisian harus memperhatikan syarat-syarat yang telah diatur dalam undang-undang yang memberi kewenangan personel kepolisian untuk melakukan tindakan diskresi.

Kewenangan dan dasar hukum bagi anggota POLRI dalam melaksanakan diskresi diatur dalam undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP),

Menurut Aiptu Usman¹⁰ yang merupakan anggota bagian pengawasan seksi profesi dan pengamanan (Propam) Polrestabes Makassar, menjelaskan bahwa ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh personel kepolisian dalam melaksanakan diskresi yaitu :

- a. Tindakan diskresi harus benar-benar diperlukan;
- b. Tindakan yang dilakukan benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian;

¹⁰Usman, Anggota Bagian Pengawasan Seksi Profesi Dan Pengamanan (Propam) Polrestabes Makassar, *Wawancara*, Makassar, 28 November 2016.

- c. Tindakan yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang tepat, yaitu untuk menghilangkan gangguan atau mencegah terjadinya bahaya bagi ketertiban dan keamanan umum.

Syarat-syarat pelaksanaan diskresi diatur juga dalam undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan :

- a. Pasal 22 ayat (1) diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang.
- b. Setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk :
 - 1) Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
 - 2) Mengisi kekosongan hukum;
 - 3) Memberikan kepastian hukum;
 - 4) Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia, Pasal 16 ayat (2) tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (i) adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) di dalam Penjelasan pasal 5 ayat (1) huruf (a) angka (4) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang

hukum acara pidana (KUHP) yang dimaksud dengan “*tindakan lain*” adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Dalam pelaksanaan diskresi yang dilakukan oleh personel kepolisian, semua personel kepolisian dapat melakukan diskresi, tidak memandang pangkat (perwira, bintara, maupun tamtama) untuk melakukan diskresi. Hal ini didasari pada undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) pasal 4 *penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia* dan pasal 6 ayat (1) huruf (a) *penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia*.

Adapun diskresi dianggap tidak sah ketika personel kepolisian melaksanakan diskresi dengan melampaui wewenangnya, mencampuradukkan wewenangnya, dan bertindak sewenang-wenang. Penggunaan diskresi dikategorikan melampaui wewenang apabila bertindak melampaui batas waktu berlakunya wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan dan bertindak melampaui batas wilayah berlakunya wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan diskresi dikategorikan mencampuradukkan wewenang apabila menggunakan diskresi tidak sesuai dengan tujuan wewenang yang diberikan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).

Oleh karena diskresi kepolisian digunakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan negara dan sangat ditentukan oleh perilaku setiap personel kepolisian selaku aparatur pemerintahan yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka dalam mengambil tindakan dan penilaian harus tetap bersandar pada undang-undang dan hak asasi manusia, tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan bertumpu pada good governance. Sehingga penggunaan kewenangan diskresi tidak bisa hanya menggunakan pendekatan kekuasaan semata namun harus mempertimbangkan hak asasi manusia dan fungsi kepolisian yang melekat pada eksistensi lembaga kepolisian.

Dengan demikian kewenangan diskresi bagi personel kepolisian sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan bukanlah sebagai kekuasaan tidak terbatas. Kekuasaan tersebut tetap tunduk pada hukum yang tidak tertulis berupa asas-asas hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dikenal dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang diantaranya meliputi asas akuntabilitas, transparansi, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil penelitian di Subnit perlindungan perempuan dan anak (PPA) Sat Reskrim Kepolisian Resort Kota besar Makassar ditemukan bahwa terdapat berbagai tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 yang jika digambarkan dalam bentuk tabel akan tergambar sebagai berikut:

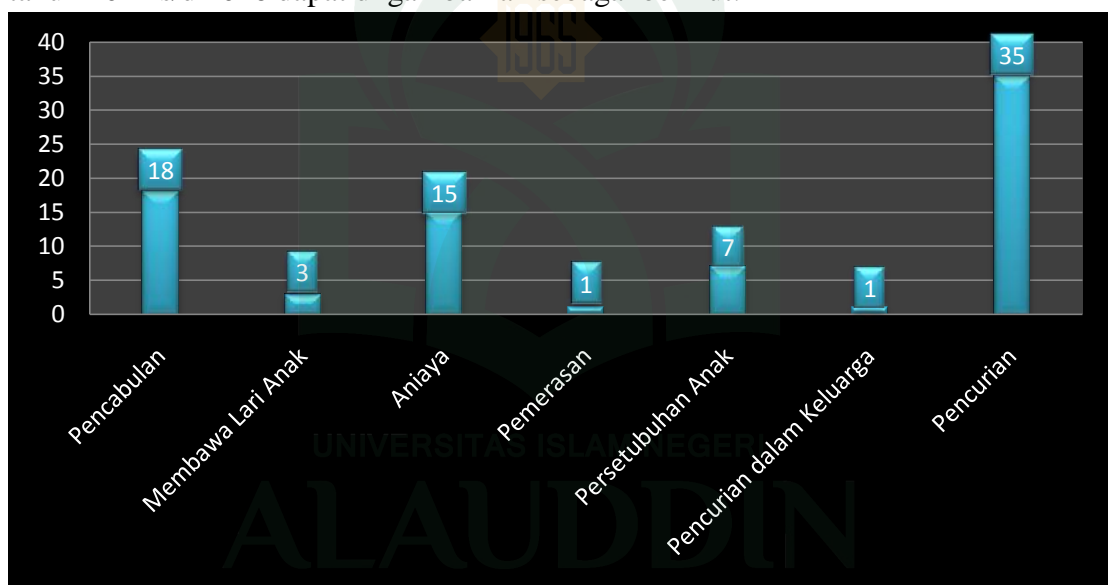
Tabel 4.3. jumlah kasus anak berhadapan dengan hukum yang ditangani unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) Sat Reskrim Polrestabes Makassar sejak tahun 2014 s/d 2016

No	Jenis tindak pidana	Jumlah kasus
1	pencabulan	18

2	Membawa lari anak	3
3	Aniaya	15
4	pemerasan	1
5	Persetubuhan anak	7
6	Pencurian dalam keluarga	1
7	pencurian	35

Sumber: data unit pelayan perempuan dan anak (PPA) Sat Reskrim Polrestabes Makassar

Data jumlah kasus anak berhadapan dengan hukum yang ditangani unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) Sat Reskrim Polrestabes Makassar sejak tahun 2014 s/d 2016 dapat di gambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.3 jumlah kasus anak berhadapan dengan hukum yang ditangani unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) Sat Reskrim Polrestabes Makassar sejak tahun 2014 s/d 2016

Tabel tersebut merupakan tabel jumlah kasus yang ditangani langsung oleh unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) Sat Reskrim Kepolisian Resort Kota besar Makassar sejak tahun 2014 sampai tahun 2016. Karena banyaknya kasus pidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya sehingga

dilakukan pembagian dalam penanganan kasusnya seperti kasus narkoba ditangani langsung oleh satuan Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubnit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Kepolisian Resort Kota besar Makassar ditemukan bahwa setiap kasus yang melibatkan anak sebagai pelakunya seringkali diupayakan untuk dilakukannya perdamaian dengan menggunakan kewenangan diskresi hal ini juga demi meringankan beban kerja para penyidik. Namun demikian terdapat kasus-kasus tertentu yang tetap harus diproses sebagaimana hukum formil seperti kasus-kasus pencabulan.

Berdasarkan hasil penelitian, juga ditemukan pola-pola tindakan diskresi menghentikan kasus anak berhadapan dengan hukum di Kota Makassar demi kepentingan umum dan pertimbangannya sebagaimana digambarkan sebagai berikut :

No	Kasus Yang Diselesaikan	Pertimbangan
1	Kasus yang berkaitan dengan kerugian materil (penipuan, penggelapan, perusakan barang, pencurian dalam keluarga)	a. Pengembalian kerugian b. Terjadinya kesepakatan untuk berdamai
2	Kasus yang berkaitan dengan jiwa (penganiayaan, kecelakaan meninggal dunia, bentrok antar kelompok)	a. Terjadinya kesepakatan untuk berdamai b. Adanya unsur kelalaian c. Pemberian santunan dan ganti kerugian d. Alasan kemanusiaan e. Penyelesaian secara adat

		f. Dampak yang lebih luas g. Ketertiban masyarakat
--	--	---

Sumber: data yang diolah oleh penulis

Berdasarkan gambaran kasus yang diselesaikan di atas dapat dilihat bahwa adanya kesepakatan damai merupakan unsur yang sangat berperan bagi pertimbangan penyidik. Namun demikian ditemukan pula bahwa meskipun kesepakatan damai telah tercapai, terdapat beberapa alasan yang mendorong penyidik untuk tetap memproses perkaranya sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :

No	Kasus Yang Tidak Diselesaikan	Pertimbangan
1	Kasus yang berkaitan dengan kerugian materil (penipuan, penggelapan, perusakan barang, pencurian dalam keluarga)	a. Menjadi perhatian publik dan resahkan masyarakat b. Dilakukan berulang-ulang c. Jadi mata pencaharian atau sengaja mengambil keuntungan d. Pengembalian kerugian melebihi yang diderita
2	Kasus yang berkaitan dengan jiwa (penganiayaan, kecelakaan meninggal dunia, bentrok antar kelompok)	a. Adanya unsur kesengajaan b. Patut dipersalahkan atas kelalaian yang terjadi (mabuk, narkoba) c. Menjadi perhatian publik dan resahkan masyarakat d. Dilakukan berulang-ulang e. Pemberian santunan dan ganti kerugian melebihi kewajaran

		f. Beri pelajaran pada masyarakat
3	Kasus yang berkaitan dengan kesusilaan	a. Menjadi perhatian publik dan resahkan masyarakat b. Merusak masa depan psikis korban

Sumber: data yang diolah oleh penulis

Berdasarkan kedua pertimbangan tersebut dapat dilihat bahwa terdapat hal-hal meringankan yang menjadi pertimbangan penyidik untuk tidak memproses perkaranya dan terdapat hal-hal memberatkan yang menjadi pertimbangan penyidik untuk tetap memproses perkaranya meskipun telah terjadi perdamaian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi anak di bawah umur melakukan tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar diantaranya adalah:
 - a. Faktor kemiskinan
 - b. Faktor rendahnya pendidikan
 - c. Faktor pengaruh negatif lingkungan pergaulan
 - d. Faktor pengaruh negatif teknologi
2. Yang menjadi landasan pemikiran dari penerapan konsep Restorative Justice pada penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar adalah Bahwa Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda, anak berperan sangat strategis sebagai generasi penerus suatu bangsa. Sehingga perubahan Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak menjadi penting hal ini diadasi bahwa telah terjadi kegagalan dalam sistem peradilan pidana anak untuk memberikan rasa keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, lalu kemudian lahir Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang didalamnya mengamanahkan untuk menerapkan konsep *Restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan dipercaya dapat menjadi solusi yang tepat untuk memberikan rasa keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
 - a. Pelaksanaan diskresi dalam penyelesaian tindak pidana oleh anak di kota Makassar seringkali dilakukan karena sangat membantu bagi penyidik dalam

meringankan beban kerja terlebih lagi banyaknya kasus tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya. Dengan pertimbangan pengembalian kerugian, terjadinya kesepakatan untuk berdamai, adanya unsur kelalaian, pemberian santunan dan ganti kerugian, alasan kemanusiaan, ketertiban masyarakat. Namun demikian terdapat kasus-kasus tertentu yang tetap diproses sebagaimana hukum formil seperti kasus yang berkaitan dengan asusila.

B. Implikasi Penelitian

1. Kepada setiap lapisan masyarakat khususnya bagi pemerintah untuk mengupayakan peningkatan perekonomian masyarakat agar tidak ada lagi yang hidup dibawah garis kemiskinan, memberikan hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan khususnya di bangku sekolah agar tidak ada lagi anak yang hidup tanpa pendidikan, memberikan perhatian khusus untuk daerah-daerah yang sarat akan tindak kejahatan untuk mencegah pengaruh negatif terhadap anak, serta memberikan pengawasan yang ketat dalam penggunaan teknologi khususnya bagi anak.
2. Kepada setiap komponen-komponen yang tergabung dalam sistem peradilan pidana anak agar bersungguh-sungguh dalam menjalankan amanah dari undang-undang agar setiap anak yang berhadapan dengan hukum dapat merasakan keadilan.
3. Perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dari pimpinan kepolisian baik ditingkat mabes Polri dan Polda setempat, maupun pengawas internal kepolisian itu sendiri berupa laporan, baik lisan maupun tulisan (administrasi) jika personel kepolisian dalam bertindak di lapangan. Sehingga para personel yang menggunakan kewenangan diskresi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar yang tidak sesuai peraturan dapat mempertanggung jawabkan tindakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Mahendra Iswara, I Made. "Mediasi Panel Penerapan Nilai-Nilai *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Di Bali", *Tesis*. Jakarta: Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2013.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (legal theory) Dan teori Peradilan (judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*. cet. IV; Jakarta: kencana purnada media group, 2012.
- Ancel, Marc . *Social Defence A Modern Approach To Criminal Problems*. London: Routledge & Kegan Paul, 1965.
- Andenaes, J. *The General Part Of The Criminal Law Of Norway*. London: Fred D. Rothmant & Co.sweet & Maxwell, 1965.
- Arief, Barda nawawi. *bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Cet. II; Bandung: citra aditya bakti, 2002.
- Bassiouni, M. Cherif. *Substantive Criminal Law*. USA: C. Thomas Publicher, 1978.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Daly, Kathleen. *Restorative justice Philosophy to practice*. United Kingdom: Dartmouth Publishing Company, 2000.
- Djamil, M. Nasir. *anak bukan untuk dihukum*. Cet. II; Jakarta: sinar grafika, 2013.
- Grupp, Staley. *Theories Of punishment*. London: Indiana University Press, 1971.
- Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Hasyim Rado, Rudini. "Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", <http://stimur.blogspot.co.id/2015/05/keadilan-restoratif-dalam-sistem.html>, (03 september 2016).
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Semarang: Sinar Grafika, 2005.
- Hukum Prodeo, "Jenis-Jenis Perbuatan Yang termasuk Tindak Pidana", *Situs Resmi Hukum Prodeo*. <http://www.hukumprodeo.com/jenis-jenis-perbuatan-yang-termasuk-tindak-pidana/> (03 september 2016).
- Irawan, Ahmad. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013.
- _____. "Beberapa Hal Dalam Rancangan KUHAP". Makalah Disampaikan Dalam Seminar Nasional yang Diselenggarakan oleh Asosiasi Advocad Indonesia di Ballroom Hotel Grand Clarion, Makassar, 24 Oktober 2013.
- _____. *sistem pidana dan pembedaan Indonesia dari retribusi ke reformasi*. Cet. I; Jakarta : Pradnya paramita, 1986.
- Jamali, Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Kartono, Kartini. *Psikologi Anak*. Bandung: Alumni, 1982.

- Kassebaum, Gene. *Delinquency And Social Policy*. London: Prentice Hall, 1974.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media, 2013.
- Makarao, Taufik. "Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak", *Laporan Hasil Penelitian*. Jakarta:Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI, 2013.
- Marlina I, *Sosio Kriminologi Amalan Ilmu-Ilmu Sosial dalam study Kejahatan*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Mc Cold and wacthel. *Restorative Justice, The Internsional Institute Or Restorative Practicee(IIRP)*. New York:Criminal Justice Press&Amsterdam:Kluger Publication Journal, 2003.
- Meliala, A.Qiram Syamsuddin. *Kejahatan Suatu Tujuan Dari Psikologi Dan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007.
- Muladi. *lembaga pidana bersyarat*. cet.III; Bandung: Alumni, 1984.
- _____. *Kapita Selektu Hukum Pidana*. Semarang: BP Universitas Diponegoro, 1995.
- _____.dan barda nawawi arif. *teori-teori dan kebijakan pidana*. Cet. II; bandung: Alumni, 1998.
- Nawawi Arif, Barda. "Upaya Non-Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan". Makalah Yang Disajikan Dalam Seminar Kriminologi VI, Semarang, 16-18 September 1981.
- Packer, H.L. *The Limits Of Criminal Sanction*. California: Stanford University Press, 1968.
- Pandjaitan, Petrus Irwan dan Samuel Kikilaitety. *pidana penjara mau kemana*. Jakarta: Indhill CO, 2007.
- Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety. *Pidana Penjara Mau Kemana*. Jakarta: Indhill CO, 2007.
- Pragitno, Kuat Puji. *Aplikasi Konsep Restortive Justice Dalam Peradilan Indonesia* .Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- Rado, Rudini Hasyim. Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, <http://stimur.blogspot.co.id/2015/05/keadilan-restoratif-dalam-sistem.html>. diakses pada tanggal 03 september 2016.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak"
- Republik Indonesia. "Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak"
- Republik Indonesia, *KUHP/KUHAP*. Surabaya: Bhafana Publishing, 2014.
- Rizky, Rudi. *Restorative justice (suatu pengenalan)*. Jakarta: Perum percetakan Negara RI, 2008.

- Setiawan, Budi. “Penyelesaian Perkara Dengan Pendekatan *Restorative justice* Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak”, *Skripsi*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2015.
- Smith And Hogan. *Criminal Law*. London: Butterworths, 1978.
- Soesilo, R. *kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta-Komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bogor: Politea, 1994.
- Solehuddin, M. *Sistem sanksi dalam hukum pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, 2009.
- Sugiarto, “Pengertian Tindak Pidana” <http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html> (03 desember 2016).
- Supeno, Hadi. *Kriminalisasi anak*. Jakarta: gramedia pustaka, 2010.
- Syamsuddin, Rahman dan Ismail Aris. *Merajut hukum di Indonesia*. Jakarta: mitra wacana media, 2014.
- Wahyudi, Setyo. *Implementasi Ide Diversi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Binacipta, 1996.
- Walgito, Bimo. *Kenakalan Anak*. Yogyakarta: BP Fakultas Psikologi UGM, 1982.
- Waluyo, Bambang. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Wirartha, I Made. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006.
- Wiyono, R. *sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Jakarta: sinar grafika, 2016.
- Zulfa, Eva Achjani dan Indriyanto Seno Adji. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan* Bandung: Lubuk Agung, 2011.



LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PERMOHONAN PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Hal : Permohonan Judul Skripsi

Kepada Yth,

Ketua Jurusan/Program Studi
Ilmu Hukum
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Di

Samata-Gowa

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh. Irfan

NIM : 10500113034

Semester/Klpk : VI (Enam)/ Ilmu Hukum A

Angkatan : 2013

Dengan ini mengajukan permohonan judul skripsi sebagai berikut:

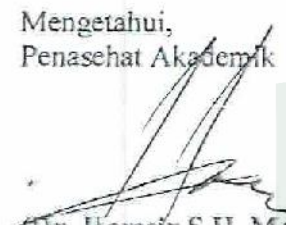
- Acc
4/6/2016
1. Penerapan *restorative justice* terhadap anak dibawah umur pelaku tindak pidana pencurian ringan sebagaimana dalam pasal 364 KUHP.
 2. Upaya kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan di jalan atau pembegalan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan upaya penanggulangannya(study kasus Polda Sulselbar).

3. Implementasi asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam proses peradilan di pengadilan Negeri Watampone Kabupaten bone.

Demikian permohonan ini saya ajukan, atas perhatian dan persetujuannya saya ucapkan terima kasih. *Wassalamu Alaikum Wr. Wb*

Samata, 31 Mei 2016

Mengetahui,
Penasehat Akademik


(Dr. Hamsir S.H. M.Hum)
NIP.19610404 199303 1 005

Pemohon


(Nida Irtan)
10500113034

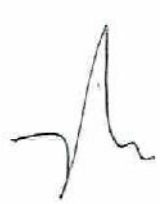
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

Muhammad Syamsuddin

PERSETUJUAN JUDUL SKRIPSI DAN PEMBIMBING

JUDUL SKRIPSI/MASALAH	HARI/TANGGAL	MENYETUJUI SEKERTARIS JURUSAN
RUMUSAN MASALAH 1. Apakah konsep restorative justice dapat menjadi solusi yang tepat dalam penyelesaian penanganan anak yang berkonflik dengan hukum? 2. Bagaimana penerapan konsep restorative justice terhadap pencurian ringan yang dilakukan oleh anak di bawah umur?		
JUDUL SKRIPSI Pencapaian restorative justice terhadap anak dibawah umur pelaku tindak pidana pencurian ringan sebagaimana dalam pasal 364 KUHP.		
RUMUSAN MASALAH 1. Bagaimana upaya kepolisian daerah Sulselbar dalam menyelesaikan kasus kekerasan di jalan yang melibatkan anak dibawah umur? 2. Apakah upaya kepolisian daerah Sulselbar dalam mencegah perkembangan kejahatan di jalan?		
JUDUL SKRIPSI Upaya kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan di jalan atau pembegalan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan upaya penanggulangannya (study kasus polda Sulselbar)		
RUMUSAN MASALAH 1. Bagaimana efektifitas penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di dalam pengadilan negeri watampone kabupaten bone? 2. Apa urgensi dari penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan?		
JUDUL SKRIPSI implementasi asas sederhana, cepat		

PENERAPAN KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
DI KOTA MAKASSAR
(Study Kasus di Kepolisian Resort Kota Makassar)

19/10



~~1. ABD. RAHMAT~~
1. AHICAM JAYAN SH.MH
2. ABD. RAHMAT KANANG MPd Ph
D.

[Handwritten signature]

Rahman Syamsuddin.

Proposal Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum

Jurusan Ilmu Hukum Pada Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Alauddin

Makassar

Oleh :

MUH. IRFAN
NIM.10500113034

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2016



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 513 Tahun 2016
TENTANG DOSEN PEMBIMBING DRAF/SKRIPSI
TAHUN 2016

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Menimbang :**
- a. Bahwa penulisan karya ilmiah (skripsi) merupakan salah satu persyaratan pada Jenjang strata satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Untuk itu dipandang perlu menetapkan dosen pembimbing;
 - b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk di angkat dan disertai tugas sebagai dosen Pembimbing Draft/Skripsi.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 3. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar
 4. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja UIN Alauddin Makassar
 5. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129 C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- a. Menunjuk saudara :
 1. Dr. Ahkam Jayadi., SH., MH
 2. Abd. Rahman Kanang., M.Pd. PhD

Sebagai pembimbing mahasiswa :

Nama : Muh. Irfan
 NIM : 105001131034
 Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : "Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Kepolisian Resort Kota Makassar)"

- b. Melaksanakan pembimbing Skripsi sampai mahasiswa tersebut menyelesaikan penulisan karya ilmiah secara profesional;
- c. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2016
- d. Surat keputusan disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditandatangani Samata
 Pada tanggal 17 Oktober 2016



Prof. Dr. Darussalam Svamsuddin, M.Ag
 NIP. 19621016 199003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923

Kampus II Jl. Slt. Alauddin No. 36, Sungguminasa-Gowa Tlp. (0411) 424835 Fax 424836

Nomor : SI.3A/PP.00.9/2028/2016

Lampiran : 1 (satu) Lembar

Hal : Undangan Seminar Draft Skripsi

An. Muh Irfan/ 10500113034

Kepada Yth;

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Dr. Ahkam Jayadi., SH., MH | Sebagai Pembimbing I |
| 2. Abd. Rahman Kanang., M.Pd., Ph.D | Sebagai Pembimbing II. |

Di-

Samata

Bertindak selaku **Pembimbing** pada **Seminar Draft Skripsi**, yang insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Oktober 2016
 Waktu : 10.00 WITA - selesai
 Tempat/Ruangan : Jurusan Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : **Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak (Study Kasus Kepolisian Resort Kota Makassar).**

Atas segala perhatian dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.

Samata, 21 Oktober 2016

Wassalam,

Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Istiqamah., SH., MH.

NIP. 19680120 199503 2 001

Catatan :

- SK Pembimbing Draft Skripsi terlampir
- Pembimbing diharapkan hadir

LEMBAR PENGESAHAN
DRAFT SKRIPSI

"PENERAPAN KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI
KOTA MAKASSAR"

Disusun Dan Diajukan Oleh:

Muh. Irfan

Nim: 10500113034

Telah Disusun oleh

pembimbing untuk melanjutkan Penulisan skripsi

Pada tanggal : 11 November 2016

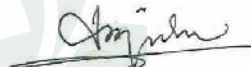
Pembimbing I



Ahkam Javadi, SH.,MH

NIP: 19611024 198703 1 003

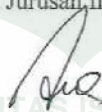
Pembimbing II



Abd. Rahman Kanang, M.Pd, Ph.D

NIP: 197312312005011034

Diketahui Oleh
Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Istiqamah S.H.M.H

NIP: 19680120 199503 2 001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar



Prof. Dr. Dardasalam Syamsuddin, M.Ag

NIP: 19621016 199003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus 1 Jln. Sultan Alauddin No. 63 Telp (0411) 864928-864931 (Fax. 864923)
Kampus 2 Jln. Yasin Limpo No.36 SamataSungguminasa-Gowa.Tlp.(0411)424835 Fax 424836

Nomor : SI.1/PP.00.9/ /2016
 Lamp : 1 (satu) exemplar
 Hal : **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Samata, 21 November 2016

Kepada

Yth. Kepala Kepolisian Resort Kota Besar (Kapolrestabes) Makassar
C.q. Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polrestabes Makassar

Di-
 Makassar

Assalamu 'AlaikumWr.Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Muh. Irfan
NIM	: 10500113034
Semester	: VII (Tujuh)
Fak/jurusan	: Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Alamat	: Samata

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya adalah:

“Penerapan Konsep *Restorative Justice* Dalam penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar”

Dengan Dosen Pembimbing: 1. Ahkam Jayadi,SH.,MH
 2. Abd. Rahman Kanang,Ph.D

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diizinkan untuk melakukan penelitian di Kantor Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar terhitung mulai tanggal 24 November s/d 24 Desember 2016

Demikian permohonan kami, atas kesediaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam

 A.n. Rektor,
 Dekan Fakultas Syariah & Hukum,

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
 NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan:
 Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata-Gowa

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nina Purwanti, S.KM
Pekerjaan/Jabatan : Kasubnit PPA Sat Restrim Restabes MKR

Menerangkan bahwa

Nama : Muh. Irfan
NIM : 10500113034

Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah Dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) telah melakukan
wawancara dengan saya pada

Hari/tanggal :
Jam :
Lokasi :

Terkait Penelitian Skripsi dengan judul "Penerapan Konsep Restorative
Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak di
Kota Makassar"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

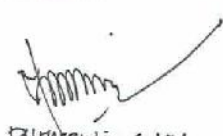
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Makassar,

2016

Narasumber


Nina Purwanti, S.KM

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESORT KOTA BESAR MAKASSAR
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 9, Makassar 90174



SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : SKP / 68 / V / 2017 / Subbagkum

1. Rujukan :

- a. Surat Dekan Fakultas syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor : SI.1/PP.00.9/2238/2016, Tanggal 21 November 2016. Perihal izin penelitian.
- b. Lembar Disposisi Kapolrestabes Makassar Melalui Waka No Agenda : B / 2639 / XI / 2016 / Sium tanggal 22 November 2017.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

N a m a : MUH IRFAN
NIM : 10500113034
Program Studi : Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat kampus : Jl. Yasin Limpo No. 36 samata, Gowa

Telah selesai melaksanakan penelitian pada kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dengan judul :

“ PENERAPAN KONSEP RESTIRATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA MAKASSAR “

3. Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada tanggal : 4 Mei 2017

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MAKASSAR
KABAGSUMDA POLRESTABES MAKASSAR



Tembusan :

1. Kapolrestabes Makassar
2. Direktur Fakultas Syvariah & Hukum Makassar.

BURHAN, S.Sos, S.H, MH
KOMISARIS POLISI NRP 64050215



KEMENTERIAN AGAMA
J UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus 1 Jln. Sultan Alauddin No. 63 Telp (0411) 864928-864931 (Fax. 864923)
Kampus 2 Jln. Yasin Limpo No.36 SamataSungguminasa-Gowa.Tlp.(0411)424835 Fax 424836

Nomor : SI.1/PP.00.9/ /2016
 Lamp : 1 (satu) exemplar
 Hal : **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Samata, 21 November 2016

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Makassar
 Di-
 Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Muh. Irfan
NIM	: 10500113034
Semester	: VII (Tujuh)
Fak/jurusan	: Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Alamat	: Samata

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya adalah:

“Penerapan Konsep *Restorative Justice* Dalam penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar”

Dengan Dosen Pembimbing: 1. **Ahkam Jayadi,SH.,MH**
 2. **Abd. Rahman Kanang,Ph.D**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diizinkan untuk melakukan penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Makassar terhitung mulai tanggal 24 November s/d 24 Desember 2016

Demikian permohonan kami, atas kesediaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam

A.n. Rektor,

Dekan Fakultas Syariah & Hukum,



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
 NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan:

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata-Gowa



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS

Jalan R.A. KARTINI No.18/23, TELEPON : 0411 - 3624058, FAX : 0411 - 3634667

WEBSITE : www.pn-makassar.go.id EMAIL : info@pn-makassar.go.id, pn.makassar@gmail.com

MAKASSAR 90111

LEMBAR DISPOSISI KEPANITERAAN

Tanggal dan nomor surat : 21 Nov 2016 / SI.1/PP00-9/2239/2016
 Asal Surat : WIN
 Sifat Surat : Biasa/Penting/Rahasia
 Isi Ringkasan : Permohonan izin penelitian
 An. Muh Irfan
 No. Reg. Surat : 5275 Tgl : 21 Nov 2016

Instruksi/informasi Ketua/Wakil Ketua ditujukan kepada :

1. Wakil Ketua
2. Hakim/Majelis Hakim
3. Panitera
4. Wakil Panitera
5. Panitera Muda Hukum
6. Panitera Muda Perdata
7. Panitera Muda Pidana
8. Panitera Muda Niaga
9. Humas
10. Panitera Muda PHI.
11. Panitera Muda TIPIKOR
12.

Panitera diteruskan Kepada :

1. Wakil Panitera
2. Panitera Muda Hukum
3. Panitera Muda Perdata
4. Panitera Muda Pidana
5. Panitera Muda Niaga
6. Humas
7. Panitera Muda PHI
8. Panitera Muda TIPIKOR
9.

Tanggal terima :
 Pelaksana :

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama :

Pekerjaan/Jabatan :

Menerangkan bahwa

Nama : Muh. Irfan

NIM : 10500113034

Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah Dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) telah melakukan
wawancara dengan saya pada

Hari/tanggal :

Jam :

Lokasi :


Terkait Penelitian Skripsi dengan judul **"Penerapan Konsep Restorative
Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak di
Kota Makassar"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Makassar, 30 - Nov 2016
Narasumber


.....
WIDIARSO SH, MH



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp. (0411) 864928-864930 Fax. 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Telp. 841879 Fax 8221400*

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Nomor : 244 Tahun 2017

TENTANG

**PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI (KOMPREHENSIF)
TAHUN 2017**

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat permohonan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tingkat Akhir Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum tanggal 24 Maret 2017 perihal Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif, maka dipandang perlu menetapkan **Panitia, Penguji dan Peserta Ujian**;
b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahi tugas sebagai Panitia, Penguji dan Peserta Ujian.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI. Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bebas Anggaran dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 20 tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF**
- Pertama** : Menetapkan Panitia, Penguji dan Peserta Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
- Kedua** : Tugas Panitia mempersiapkan segala instrumen yang berkaitan dengan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
- Ketiga** : Tugas Penguji melaksanakan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
- Keempat** : Tugas Panitia dan Penguji dianggap selesai setelah berakhirnya Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
- Kelima** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
- Keenam** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SURAT KEPUTUSAN ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata
Pada tanggal : 24 Maret 2017
Dekan

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan :
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa

Lampiran :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 24/TAHUN 2017
TENTANG
PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF

NO	NAMA/NIM	TEAM PENGUJI			
		MIKROFIKIH & USUL FIKIH	MIKRODIS	MIKPP	PELAKSANA KETUA/SEKANG.
1	Muh. Ifan 10500113034	Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.	Dr. H. Abd. Wahid Haddade, Lc., M.HI.	Abkam Jayadi, SH., MH.	Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag Mujahidah, SE Nurhayati Wahid
2	Idham Suryansyah 10500113026	Dr. H. Abd. Halim Talil, M.Ag.	Dr. Darsul S. Puyu, M.Ag.	Dr. Hamsir, S.H., M.Hum.	Dr. H. Abd. Halim talil, M.Ag Drs. Aminullah Nasirah Asri, S.Kom
3	Rezki Amelyah 10500113239	Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag.	Dr. Sohrab, M.Ag.	Istiqamah, S.H., M.H.	Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag Drs. Aminullah Nasirah Asri, S.Kom
4	Iga Alfianita 10500113308	Dr. M. Thahir Maloko, M.HI.	Prof. Dr. Achmad, M.Ag.	Nurjanah, S.H., M.H.	Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag Drs. Aminullah Nurhayati Wahid

Semarang, 24 Maret 2017

 Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
 19621016199003 1 003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ■ (0411) 868720, Fax. (0411) 864923
 Kampus II : Jl. P.M. Yasin Limpo No.36, Romangpolong-Gowa ■ (0411) 841679, Fax.(0411) 8221400

DAFTAR NILAI
UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF

Dosen Penguji : *Dr. H. Abdul Wahid Haddade, Lc. M. Ch*

Mata Ujian : 1. MKDU / Dirasah Islamiyah
 2. MKDK / Fikih / Ushul Fikih
 3. MKPP / Peradilan Agama

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	JURUSAN	TANDA TANGAN	NILAI		KET
					HURUF	ANGKA	
1.	10500113034	MUH. IRTAN	<i>Ilmu Hukum</i>	<i>[Signature]</i>	A	4	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

Samata, *30 April 2017*

Penguji,

[Signature]
Dr. H. Abdul Wahid Haddade, Lc. M. Ch

NIP: 1977 08 01 2003 121 002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

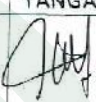

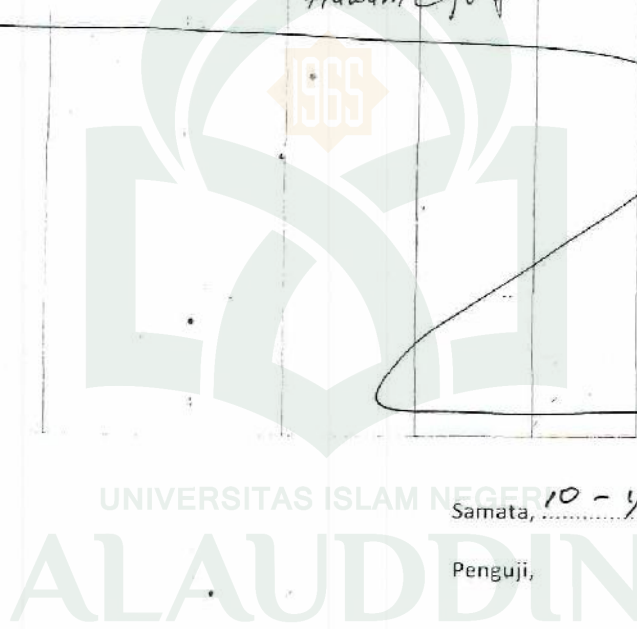
Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ■ (0411) 868720, Fax. (0411) 864923
 Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No.36, Romangpolong-Gowa ■ (0411) 841879, Fax. (0411) 8221400

DAFTAR NILAI
UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF

Dosen Penguji :


Mata Ujian :

1. MKDU / Dirasah Islamiyah
2. MKDK / Fikih / Ushul Fikih
3. MKPP / Peradilan Agama

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	JURUSAN	TANDA TANGAN	NILAI		KET
					HURUF	ANGKA	
	1050013034	Muh-Irfan	Ilmu Hukum		A	4	
							

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR, 10 - 4 - 2017

Penguji,


 NIP :

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

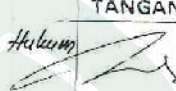
Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ■ (0411) 868720, Fax. (0411) 864923
 Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No.36, Romangpolong-Gowa ■ (0411) 841879, Fax. (0411) 8221400

DAFTAR NILAI
UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF

Dosen Penguji :


Mata Ujian :

1. MKDU / Dirasah Islamiyah
2. MKDK / Fikih / Ushul Fikih
3. MKPP / Peradilan Agama

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	JURUSAN	TANDA TANGAN	NILAI		KET
					HURUF	ANGKA	
	10500113034	Muh. Irfan	Kmu Hukum		B	3	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
 Samata, 11 April 2017.

Penguji,


 NIP :

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ☎ (0411) 868720, Fax. (0411) 864923
 Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No.36, Romangpolong-Gowa ☎ (0411) 841879, Fax. (0411) 8221400

DAFTAR NILAI

UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF

SEMESTER 8 (.....) WISUDA PERIODE OKTOBER
 TAHUN AKADEMIK 2016/2017

Nama : MUH. IRFAN
 NIM : 10500113034
 Jurusan : ILMU HUKUM
 Judul Skripsi : PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM
 PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN
 OLEH ANAK DI KOTA MAKASSAR

MKDU (Dirasah Islamiyah)	NILAI MATA KULIAH			JUMLAH RATA-RATA
	MKDK (Fikih/Ushul Fikih)	MKPP	KESELURUHAN	
4	4	3	11	3,67

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Samata, 20 APRIL 2017

Kasubag.
 Akademik dan Kemahasiswaan



MUTIA HIDAH, S.E

NIP. 19670309 199303 2 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudari **Muh. Irfan**, NIM: 10500113034, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul "Penerapan Konsep *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di bawah Umur Di Kota Makassar", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

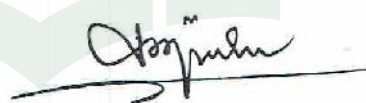
Makassar, 11 April 2017

Pembimbing I

Pembimbing II



Ahkam Jayadi, S.H., M.H.
NIP. 19611024 198703 1 003



Abdul Rahman Kanang, Ph.D.
NIP. 19731231 200501 1 034

UNIVERSITAS ISLAM ALAUDDIN
MAKASSAR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

*Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp (0411) 864928-864930 Fax. 864923
 Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Telp. 841879 Fax 8221400*

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
 Nomor : 422 Tahun 2017
T E N T A N G
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI
TAHUN 2017

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan :
 N a m a : Muh. Irfan
 N I M : 10500113034
 Jurusan : Ilmu Hukum
 Hari/Tanggal : Rabu, 26 April 2017
 Prihal : Ujian Seminar Hasil/Skripsi
 Judul : "Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak dibawah Umur di Kota Makassar"
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil/Skripsi;
 b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
 c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
 4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan** :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasil/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
 Sekretaris : Ietiqamah, S.H, M.H
 Penguji I : Dr. Rahman Syamsuddin, S.H, M.H
 Penguji II : Dr. Marilang, M.Hum
 Pelaksana : 1. Mujahidah, SE
 2. Nurhayati Wahid
- Kedua** : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil/Skripsi
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata
 Pada tanggal : 21 April 2017
 Dekan,

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
 NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan
 Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp (0411) 864928-864930 Fax. 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa - Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

Nomor : ~~172~~ /SI.1/PP.00.9/ 4. /2017
 Sifat : Penting
 Lamp : -
 Hal : **UNDANGAN SEMINAR HASIL**

Samata, 21 April 2017

Kepada

- Yth.* 1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (Ketua)
 2. Istiqamah, S.H, M.H (Sekertaris)
 3. Rahman Syamsuddin, S.H, M.H (Penguji I)
 4. Dr. Marilang, M.Hum (Penguji II)
 5. Ahkam Jaadi, S.H, M.H (Pembimbing I)
 6. Abd. Rahman Kanang, M.Pd, Ph.D (Pembimbing II)
 7. Pelaksana

Di

Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Seminar Hasil/Skripsi atas nama :

Nama : Muh. Irfan

NIM : 10500113034

Jurusan : Ilmu Hukum

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/(i) pada Ujian Seminar Hasil/Skripsi, Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 26 April 2017

Waktu : Pukul 14.00-15.00 Wita

Tempat : Ruang 107

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

Wassalam

Dekan,



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. *z*

NIP. 19621016 199003 1 003










DAFTAR HADIR UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI (S1)

NAMA : Muh. Irfan

NIM : 10500113034

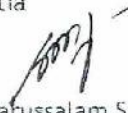
JURUSAN : Ilmu Hukum

JUDUL SKRIPSI : "Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur di Kota Makassar"

NO.	NAMA	JABATAN/STATUS	T. TANGAN
1.	Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag	Ketua	1. 
2.	Istiqamah, S.H, M.H	Sekretaris	2. 
3.	Ahkam Jayadi, S.H, M.H	Pembimbing	3. 
4.	Abd. Rahman Kanang, M.Pd, Ph.D	Pembimbing	4. 
5.	Rahman Syamsuddin, S.H, M.H	Penguji	5. 
6.	Dr. Marilang, M.Hum	Penguji	6. 
7.	Mujahidah, SE	Pelaksana	7. 
8.	Nurhayati Wahid	Pelaksana	8. 
9.	Muh. Irfan	Mahasiswa	9. 

Samata, 26 April 2017

Ketua Panitia


Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.

NIP 19621016 199003 1 003

PENILAIAN UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI (S1)

NAMA : Muh. Irfan

NIM : 10500113034


JURUSAN : Ilmu Hukum

JUDUL SKRIPSI : "Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur di Kota Makassar"

NO.	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	RATA-RATA
1.	Metode Penelitian/Penulisan	4	
2.	Materi	4	
3.	Penguasaan/Analisa	4	
4.	Cara Presentase	4	
	Jumlah		
	Nilai Akhir Rata-Rata4...../4 =	4

Samata, 26 April 2017

Penilai,


Samsudin.....

PENILAIAN UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI (S1)

NAMA : Muh. Irfan

NIM : 10500113034

JURUSAN : Ilmu Hukum

JUDUL SKRIPSI : "Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur di Kota Makassar"

NO.	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	RATA-RATA
1.	Metode Penelitian/Penulisan		
2.	Materi		
3.	Penguasaan/Analisa		
4.	Cara Presentase		
	Jumlah		
	Nilai Akhir Rata-Rata/4 =	

Samata, 26 April 2017

Penilai,

[Signature]
[Signature]

PENILAIAN UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI (S1)

NAMA : Muh. Irfan

NIM : 10500113034

JURUSAN : Ilmu Hukum

JUDUL SKRIPSI : "Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur di Kota Makassar"

NO.	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	RATA-RATA
1.	Metode Penelitian/Penulisan	3,5	
2.	Materi	3,5	
3.	Penguasaan/Analisa	3,5	
4.	Cara Presentase	3,5	
	Jumlah		
	Nilai Akhir Rata-Rata/4 =	

Samata, 26 April 2017

Penilai,



 Alham)

PENILAIAN UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI (S1)

NAMA : Muh. Irfan

NIM : 10500113034

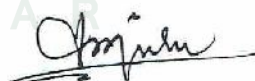
JURUSAN : Ilmu Hukum

JUDUL SKRIPSI : "Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur di Kota Makassar"

NO.	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	RATA-RATA
1.	Metode Penelitian/Penulisan	4	A
2.	Materi	4	
3.	Penguasaan/Analisa	4	
4.	Cara Presentase	4	
	Jumlah	16	A
	Nilai Akhir Rata-Rata16.../4 = 4	

Samata, 26 April 2017

Penilai,


Abd. Rahma

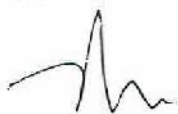
PERSETUJUAN PENGUJI DAN PEMBIMBING

Penguji penulisan skripsi Saudara **Muh. Irfan**, NIM: 10500113034, mahasiswa program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan berjudul **"Penerapan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur di kota makassar"**, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk di proses selanjutnya.

Gowa, 02 April 2017

Penguji I



Rahman Svamsuddin. S.H.,M.H
NIP. 19821207 200901 1 010

Penguji II



Dr. Marilang. S.H.,M.Hum.
NIP. 19621231 199303 1 024

Pembimbing I



Ahkam Jayadi. S.H.,M.H.
NIP.19611024 198703 1 003

Pembimbing II



Abdul Rahman Kanang.M.Pd.,Ph.D
NIP. 19731231 200501 1 034



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

*Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp (0411) 864928-864930 Fax. 864923
 Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sangguminasa - Gowa Telp. 841879 Fax 8221400*

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
 Nomor : S/3 Tahun 2017
TENTANG
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI
TAHUN 2017

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan :
 Nama : Muh. Irfan
 N I M : 10500113026
 Jurusan : Ilmu Hukum
 Hari/Tanggal : Kamis, 18 Mei 2017
 Prihal : Ujian Munaqasyah/Skripsi
 Judul : Tinjauan Yuridis terhadap Pelaku Kejahatan yang Mempunyai Gangguan Kejiwaan
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Munaqasyah/Skripsi;
 b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
 c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
 4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Junto Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Munaqasyah/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
 Sekretaris : Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag
 Penguji I : Dr. Hamsir, M.Hum
 Penguji II : Drs. H. Munir Salim, M.H
 1. Mujahidah, SE
 2. Nurhayati Wahid

Ujian Munaqasyah/Skripsi

- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata
 Pada tanggal : 15 Mei 2017

Dekan :
 Kuasa Menteri : 1880/S/1/KP.07.6/05/2017
 Tanggal 15 Mei 2017

Dekan : H. Abd. Halim Talhi, M.Ag
 NIP. 19711020 19703 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

*Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp (0411) 864928-864930 Fax. 864923
 Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa Gowa Telp. 841879 Fax 8221400*

Nomor : 1880/SL.1/PP.00.9/5../2017
 Sifat : Penting
 Lamp : -
 Hal : UNDANGAN MUNAQASYAH

Samata, 15 Mei 2017

Kepada

- Yth.*
1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (Ketua)
 2. Istiqamah, S.H, M.H (Sekertaris)
 3. Rahman Syamsuddin, S.H, M.H (Penguji I)
 4. Dr. Marilang, M.Hum (Penguji II)
 5. Ahkam Jaadi, S.H, M.H (Pembimbing I)
 6. Abd. Rahman Kunang, M.Pd, Ph.D (Pembimbing II)
 7. Pelaksana

Di
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wa. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Munaqasyah atas nama :

Nama : Muh. Irfan
 N I M : 10500113034
 Jurusan : Ilmu Hukum

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/i pada Ujian Munaqasyah, Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 18 Mei 2017
 Buka Sidang : 08.30 WITA
 Waktu : Pukul 11.00 – 12.00 WITA
 Tempat : Ruang Ujian Munaqasyah

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalam

Dekan,

Kampus I : 1880/SL.1/KP.07.6/05/2017

Tanggal : 15 Mei 2017

Dr. Abd. Halim Talhi, M.Ag
 NID. 10201097031002

RIWAYAT HIDUP



Muh. Irfan Lahir di Bone pada tanggal 15 April 1995. Merupakan anak kedua dari pasangan **Ambo Upe** dan **Marhati**.

Memulai pendidikan formal di SDN 51 Abbanuang Kec. Awangpone, Kab. Bone, dan tamat pada tahun 2007. Kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di tingkat Madrasah Tsanawiah Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujing BoneKec. Dua Boccoe Kab. Bone, tamat pada tahun 2010. Kemudian penulis kembali melanjutkan pendidikan di tingkat Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujing BoneKec. Dua Boccoe Kab. Bone, dan tamat pada tahun 2013. Kemudian pada tahun yang sama pula penulis diterima pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum melalui penerimaan mahasiswa dengan jalur UM-PTKIN di UIN Alauddin Makassar. Penulis berharap untuk dapat meraih ilmu dan pendidikan yang lebih tinggi lagi.